



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

SERIAL BUKU PENGAWASAN PARTISIPATIF

# PEMILU BERSIH, DAMAI, DAN BERMARTABAT

SUDUT PANDANG KHONGHUCU

萬世師表

wàn shì shī biǎo

詩書萬卷  
聖賢心

shī shū wàn juǎn  
shèng xián xīn

日月兩輪  
天地眼

rì yuè liǎng lún  
tiān dì yǎn







**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

# PEMILU BERSIH, DAMAI, DAN BERMARTABAT

Sudut Pandang Agama Khonghucu

萬世師表

wàn shì shī biǎo

詩書萬卷聖賢心

shī shū wàn juǎn shèng xián xīn

日月兩輪天地眼

rì yuè liǎng lún tiān dì yǎn

**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Republik Indonesia**

Jl. M. H. Thamrin 14  
Jakarta Pusat  
Indonesia

### **PENGARAH**

Abhan  
Mochammad Afifuddin  
Ratna Dewi Pettalolo  
Rahmat Bagja  
Fritz Edward Siregar

### **PEMBINA**

Gunawan Suswantoro

### **PENANGGUNG JAWAB**

Ahmad Khumaidi

### **KETUA TIM**

Feizal Rachman

### **WAKIL KETUA**

Fathul Andi Rizky Harahap  
Bugi K. Widiyanto  
Erni Kusumastuty

### **PENELITI**

Masykurudin Hafidz  
Muhammad Ikhsan  
Deitry Aritonang  
Muhammad Zaid  
Nugroho Noto Susanto  
Sarmidi Husna  
Pdt. Hariman Pattianakotta  
Antonius Beny Wijayanto  
Eko Nugroho Rahardjo  
I Made Wirayasa  
Peter Lesmana

### **ASISTEN PENELITI**

Hanif Vidi Yuwono  
Nurdiansyah  
Kelfin Roy D. Boseran  
Sonta S.  
Aji Nugroho  
Keke Eskatario  
A. Farichin Beka  
Asep Saepurrohman  
Ike Aprilina  
Sudarmin Nurdani  
Riedo Adi Saputri

### **DESAIN & TATA LETAK**

Mohd Chalel

## SAMBUTAN

**T**okoh agama adalah aktor penting dalam melakukan pendidikan politik masyarakat. Tokoh agama juga pelaku utama yang mampu menyampaikan pesan kedamaian antarumat beragama terutama di tengah gejolak politik yang dapat membangun praktik politik uang dan politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

Untuk itu, kehadiran literasi damai dan menyejukkan sangat dibutuhkan. Untuk menelurkan itu, Bawaslu menginisiasi sebuah gagasan sebagai bentuk upaya strategis agar para tokoh agama dapat mendukung Pemilu yang terbebas dari praktik politik uang dan politisasi isu SARA. Dengan begitu dapat tercipta Pemilu yang aman dan berkualitas.

Gagasan untuk melibatkan tokoh-tokoh agama dalam menciptakan Pemilu damai, aman dan berkualitas dimanifestasikan dengan menggelar pertemuan-pertemuan. Forum-forum yang dibangun itu membahas persoalan-persoalan dalam Pemilu, pencegahannya dan solusinya. Dari pertemuan-pertemuan tersebut tergalaslah pembuatan Buku Materi Ceramah Pengawasan dengan Perspektif Agama.

Buku ini adalah referensi bagi para tokoh agama dalam menyampaikan materi pada masyarakat. Bawaslu berharap buku ini menjadi bahan bacaan yang dapat dipakai para tokoh agama untuk menyakinkan masyarakat bahwa semua agama mengajarkan melawan politik uang. Bahwa semua agama mengajarkan untuk tidak saling membenci sebagai bentuk politisasi SARA.

Melalui buku ini, Bawaslu mengajak tokoh agama menjadi agen untuk sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilu. Sebab di dalam buku ini tertuang energi penyelenggaraan Pemilu yang berisikan wawasan pencegahan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap praktik politik uang dan politisasi SARA dalam Pemilu.

Pada akhirnya buku ini hadir sebagai oase baru di tengah-tengah maraknya isu politisasi uang dan SARA dalam pemilu. Sehingga ke depan, Pemilu dapat berjalan lebih baik, aman dan berkualitas.

“Bersama rakyat awasi Pemilu, Bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu”

**Abhan**

Ketua Bawaslu

# **WEI DE DONG TIAN**



# KATA SAMBUTAN

**Salam Kebangsaan Indonesia Raya,**

**Salam Kebajikan, Wei De Dong Tian.**

Puji dan syukur kehadiran Tian yang telah berkenan merahmati dan membimbing kita semua, sehingga buku **PEMILU BERSIH, DAMAI, DAN BERMARTABAT Sudut Pandang Agama Khonghucu** yang difasilitasi oleh Badan Pengawas PEMILU (BAWASLU) dapat diterbitkan.

Buku ini banyak mengangkat pesan orang bijak jaman dahulu yang memberi panduan kepada kita agar dalam upaya membereskan rumah tangga, mengatur negara dan mencapai damai di dunia harus dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Apakah dia seorang pemimpin negara, pimpinan legislatif, yudikatif, gubernur, bupati, walikota, hakim, advokat jaksa, polisi, jaksa, camat, lurah, RW, RT, pemimpin dan abdi negara sampai rakyat jelata mempunyai kewajiban yang sama, yaitu membina diri. Tanpa diri yang terbina takkan mungkin dapat membereskan rumah tangganya, apalagi mengatur masyarakat, bangsa dan negara serta dunia. Pokok yang kacau itu tidak pernah menghasilkan penyelesaian yang teratur baik, karena hal itu seumpama menipiskan benda yang seharusnya tebal dan menebalkan benda yang seharusnya tipis.

Kiranya tidaklah berlebihan, harapan kami kepada seluruh umat Khonghucu di Indonesia, para abdi dan pemimpin masyarakat dan negara, serta saudara-saudara setanah air, agar terus berusaha membina diri, mengasah potensi diri menjadi lebih baik

dan berakhlak mulia, berkontribusi aktif dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa yang dipenuhi semangat membina diri, saling asih, saling asah, saling asuh menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan jaya. Pada saat melihat orang yang lebih bijaksana mencoba untuk meneladani, pada saat melihat orang yang tidak bijaksana memeriksa ke dalam diri sendiri. Merasa malu untuk berbuat yang melanggar kesusilaan, malu untuk mengambil yang bukan haknya, malu untuk saling menghujat dan menjatuhkan, malu bila tidak memenuhi kewajiban dan hanya menuntut hak. Malu kepada diri sendiri, kepada orangtua dan kepada Tian.

Kami percaya, dengan membina diri, saling bekerjasama dan berlomba-lomba dalam kebajikan, Tian akan merahmati kita semua, Tian akan memberi kita ujian yang akan mampu kita hadapi bersama, yang akan menjadikan kita manusia yang lebih baik dan menjadikan kita bangsa yang besar, bukan menjerumuskan kita dalam bahaya.

**Jakarta, 26 Maret 2018**

**Dewan Pengurus MATAKIN**

**Ung Sendana L. Linggaraja**

**Ketua Umum**

## KATA PENGANTAR

### **Salam Kebajikan.. *Wei De Dong Tian***

**Xie Tian Zhi En**, Puji syukur pada Tian, atas berkat rahmat-Nya kami bisa menyelesaikan buku yang berjudul **"Pemilu Bersih, Damai, dan Bermartabat Sudut Pandang Khonghucu."**

Buku ini dibuat agar dapat menjadi referensi untuk memahami dan menambah wawasan rohaniwan dan umat terkait Pemilu berdasarkan perspektif Khonghucu. Dengan adanya buku ini kita akan bersama-sama mengupayakan suatu Pemilu yang bersih.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku fasilitator pembuatan buku ini dan kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga buku ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Masih banyak kekurangan dalam pembuatan buku ini, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya buku ini.

Lebih luas lagi kami berharap buku ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas mengenai sudut pandang agama Khonghucu dan memberikan manfaat balik dalam pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan kita semua.

### **Shanzai.**

Jakarta, 27 Februari 2018

### **Penulis**

Js. Gunadi Prabuki, Dq. Desdiandi Hartopoh, Js. Sugiandi Surya Atmaja, Dq. Mia Aulia, Dq. Aldi Destian Satya

### **Penelaah**

Dq. Peter Lesmana, Bratayana Ongkowijaya XDS

## PENDAHULUAN

Tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun dimana kita semua, masyarakat Indonesia, akan menggunakan hak dan kewajibannya untuk memilih serta dipilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu), baik Pemilihan Daerah (Pilkada), maupun Pemilihan Legislatif (Pileg), hingga Pemilihan Presiden (Pilpres).

Apapun sistem yang digunakan dalam suatu Pemilihan Umum tujuannya tetap sama, yaitu dapat memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang berkualitas, jujur, dan memiliki integritas. Sebagai warga negara, tentunya kita semua menginginkan dan mengharapkan pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang dapat membuat masyarakat Indonesia hidup sejahtera, rukun, dan saling menghormati antara satu dengan lainnya, serta membawa kemajuan bagi masyarakat bahkan negara Indonesia, dan tentunya kita semua berharap adanya pemerintahan yang bersih.

Banyak sistem yang digunakan dalam sebuah pemilihan, namun apapun sistem yang digunakan dalam suatu Pemilihan Umum, tujuannya tetap sama, yaitu dapat memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang berkualitas, pemimpin yang jujur, dan memiliki integritas.

Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat dalam Pemilihan Umum menjadi faktor penting, mengingat demokrasi berarti pemerintahan yang berasal dari rakyat. Lebih tegasnya, sebagaimana dikatakan oleh *Abraham Lincoln*, bahwa demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karenanya, terselenggaranya pemerintahan yang baik dan terpilihnya pemimpin berintegritas sangat dipengaruhi peran serta dan partisipasi rakyat sebagai warga negara.

*Founding Fathers & Mothers* kita secara khas menawarkan demokrasi Indonesia sebagai suatu cara dalam membentuk pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat. Pada awalnya demokrasi berasaskan Trisila yang terdiri dari: (1) *Sosio-nasionalisme*, yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan; (2) *Sosio-demokrasi*, yang menunjukkan bahwa demokrasi bukan semata-mata hanya terkait demokrasi politik saja, tetapi juga menyangkut demokrasi ekonomi, dan demokrasi yang berangkat dari nilai-nilai kearifan budaya Indonesia, yaitu musyawarah mufakat; (3) Ketuhanan Yang Maha Esa, yang artinya bahwa setiap rakyat Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan tanpa memandang agama, Trisila demokrasi ini kemudian berkembang menjadi Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berarti suatu sistem demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Implementasi demokrasi di Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional dalam mengatur pemerintahan dan pembagian kekuasaan. Sistem yang menganut nilai-nilai demokrasi ini tertuang jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 dan tertuang tegas dalam sila keempat Pancasila.

Buku yang kami beri judul **“Pemilu Bersih, Damai dan Bermartabat Sudut Pandang Khonghucu”** dibuat untuk memberikan pandangan kepada umat Khonghucu yang juga berperan aktif dalam proses Pemilihan Umum (demokrasi). Dengan menyajikan landasan dan prinsip-prinsip dasar tentang sistem demokrasi dari sudut pandang Khonghucu yang dikaitkan dengan kondisi demokrasi yang ada di Indonesia. Tentang sebuah pemerintahan yang baik, memahami keinginan rakyat, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Tentang pemimpin ideal yang memberikan keteladanan dan pelopor untuk berbuat lurus, sebagaimana dikatakan, jika pemimpin lurus, siapa berani tidak berbuat lurus.

Terdapat 5 (lima) bab dalam buku ini. Pada bab pertama kami menyajikan landasan-landasan teologis dan filosofis, berkaitan dengan Pemilu dalam sudut pandang agama Khonghucu. Bab kedua mengenai keikutsertaan umat Khonghucu dalam Pemilu dalam menggunakan hak dan kewajibannya, baik sebagai pemilih maupun sebagai orang yang terpilih menjadi calon wakil rakyat berdasarkan sudut pandang agama Khonghucu. Bab ketiga mengenai pandangan umat Khonghucu terhadap seorang pemimpin yang ideal yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat Indonesia menurut sudut pandang Khonghucu. Bab keempat mengenai penolakan dan ajakan umat Khonghucu untuk tidak menggunakan isu SARA sebagai komoditas politik dengan menjaga dan mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Terakhir, bab kelima, mengenai pandangan umat Khonghucu terhadap isu *money politic* yang ada di Indonesia sudut pandang Khonghucu.

**Jakarta, 27 Februari 2018**

## DAFTAR ISI

<b>SAMBUTAN</b>	<b>5</b>
<b>KATA SAMBUTAN</b>	<b>8</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>10</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>11</b>
<b>BAB 01 LANDASAN TEOLOGIS DAN FILOSOFIS</b>	<b>17</b>
A. PENGERTIAN PEMILU	17
B. TUJUAN PEMILU UNTUK MENCIPTAKAN NEGARA BERKEBAJIKAN	18
C. HASIL PEMILU ADALAH BERBAGI TUGAS BUKAN BERBAGI KESUKAAN	19
D. PERSIAPAN PEMILU ADALAH AJANG MEMPERLIHATKAN RASA TAHU MALU	20
<b>BAB 02 KEIKUTSERTAAN UMAT KONFUSIANI DALAM PEMILU INDONESIA</b>	<b>22</b>
A. HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI PEMILIH	22
B. APIT (AWASI, PILIH, IKUTI, TAGIH)	26
C. HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI CALON WAKIL RAKYAT (TERPILIH)	31

<b>BAB 03</b>	<b>PEMIMPIN IDEAL SUDUT PANDANG KHONGHUCU</b>	<b>38</b>
A.	KEPERCAYAAN RAKYAT	<b>38</b>
B.	PEMIMPIN SEBAGAI AYAH BUNDA RAKYAT	<b>41</b>
C.	KEDALAM SEBAGAI ZHISHENG, KELUAR SEBAGAI RAJA	<b>43</b>
D.	KETELADANAN DAN PENGAYOMAN	<b>48</b>
E.	MEMBENARKAN NAMA-NAMA	<b>51</b>
F.	PEDOMAN PEMERINTAHAN	<b>55</b>
G.	PEMERINTAHAN YANG BERKEBAJIKAN	<b>57</b>
<b>BAB 04</b>	<b>MENOLAK POLITISASI SARA SEBAGAI KOMODITAS POLITIK</b>	<b>63</b>
A.	HIDUP HARMONIS DALAM KEBERAGAMAN	<b>63</b>
B.	ISU YANG MERESAHKAN UNTUK BANGSA INDONESIA	<b>65</b>
C.	MEDIA SEBAGAI ALAT MENYEBARKAN INFORMASI	<b>68</b>
D.	TOLERANSI DIDALAM MASYARAKAT	<b>69</b>
E.	ANCAMAN PIDANA DALAM KUHP TERKAIT SARA, LARANGAN KAMPANYE DAN SANKSI ATAS PELANGGARAN LARANGAN KAMPANYE DALAM PEMILU TERKAIT SARA	<b>70</b>
<b>BAB 05</b>	<b>MENOLAK POLITIK UANG</b>	<b>77</b>
A.	PANDANGAN HUKUM PADA POLITIK UANG	<b>77</b>
B.	POLITIK UANG DALAM SUDUT PANDANG KHONGHUCU	<b>84</b>
C.	PEMILU YANG BERSIH TANPA POLITIK UANG	<b>89</b>
<b>PENUTUP</b>		<b>95</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>96</b>

# BAB 01

---

**“BAIK BURUK PEMERINTAHAN ADALAH TERGANTUNG CARA PENYELENGGA-  
RAAN BERBAGAI DEPARTEMEN. SUATU  
DEPARTEMEN JANGANLAH DIBERIKAN  
KEPADA ORANG YANG DISUKAI, TETAPI  
BERIKANLAH KEPADA YANG MEMILIKI  
KEMAMPUAN. KEDUDUKAN JANGAN-  
LAH DIBERIKAN KEPADA YANG BURUK  
KEBAJIKAN, MELAINKAN BERIKANLAH  
KEPADA YANG BAJIK DAN BIJAK.”**

# LANDASAN TEOLOGIS DAN FILOSOFIS

## A. PENGERTIAN PEMILU

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia no. 7 tahun 2017, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah

*“Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

Lebih lanjut dalam PKPU tertulis prinsip dalam Pemilu adalah mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib; terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif; dan efisiensi. Prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Khonghucu dimana setiap prinsip memerlukan konsistensi ketaatan dan hal ini dapat dicapai dengan sikap memeriksa diri dan memperbaiki diri, dua hal yang merupakan hakekat dalam membina diri dalam agama Khonghucu.

Kedaulatan rakyat merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemilu, hal ini berarti tanpa suara rakyat tidak akan pernah ada

Pemilu. Dalam *Shujing* Bab VB:2, tersurat;

*“Rakyat, bila bukan karena adanya pemimpin, tidak akan memperoleh bimbingan membangun kehidupannya. Pemimpin, bila bukan karena adanya rakyat, tidak akan dapat menjadi pemerintah bagi keempat penjuru negerinya.”*

Berdasarkan ayat diatas, maka antara rakyat dan pemimpin sangat baik jika dapat tercipta jalinan yang harmonis. Niscaya *Huang Tian* berkenan memberkahi negara ini menjadi berkebakjikan berlaksa jaman tanpa batas.

## **B. TUJUAN PEMILU UNTUK MENCIPTAKAN NEGARA BERKEBAJIKAN**

Mengenai pemilu untuk menciptakan negara berkebakjikan, tersurat dalam *Shujing* Bab VI:11, sebagai berikut;

*“Pemimpin tanpa rakyat tiada yang diperintah. Rakyat tanpa pemimpin tiada yang dilayani. Jangan menganggap diri besar dan meremehkan orang lain. Bila orang kebanyakan, pria maupun wanita, tiada kesempatan memacu – mengembangkan diri, tuan dari rakyat itu tiada pembantu yang tepat untuk menyempurnakan karyanya.”*

Rakyat Indonesiamengharapkan pemimpin yang setiapada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk memilih, menyatakan pendapat melalui suara, berpartisipasi sebagai bagian penting dari negara sehingga turut serta dalam menentukan haluan negara. Pemimpin

yang mendapat dukungan rakyat karena terpilih atas dasar suara rakyat akan selalu bersama-sama dengan rakyat dalam kondisi apapun juga untuk menciptakan negara berkeadilan, negara yang mampu mengembangkan rakyatnya sehingga pada gilirannya nanti akan membantu menyempurnakan karya pemimpinnya.

### **C. HASIL PEMILU ADALAH BERBAGI TUGAS BUKAN BERBAGI KESUKAAN**

Mengenai pemilu adalah berbagi tugas bukan berbagi kesukaan, tersurat dalam *Shujing* Bab VIII B : 5, sebagai berikut;

*“Baik buruk Pemerintahan adalah tergantung cara penyelenggaraan berbagai departemen. Suatu departemen janganlah diberikan kepada orang yang disukai, tetapi berikanlah kepada yang memiliki kemampuan. Kedudukan janganlah diberikan kepada yang buruk kebajikan, melainkan berikanlah kepada yang baik dan bijak.”*

Jika Pemilu diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab, maka akan menghasilkan pemimpin-pemimpin pilihan rakyat yang meletakkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. Yang terpilih untuk menduduki suatu jabatan akan mawas diri, berani mengakui jika tidak memiliki kecakapan dalam jabatan tersebut dan berani mundur untuk memberikan kepada orang yang lebih mampu. Tidak menerima jabatan jika dasarnya adalah kedekatan personal ataupun kepentingan yang bersifat keuntungan pribadi atau kelompok.

## D. PERSIAPAN PEMILU ADALAH AJANG MEMPERLIHATKAN RASA TAHU MALU

Mengenai pemilu adalah ajang memperlihatkan rasa tahu malu tersurat dalam *Shujing IV : 13*, sebagai berikut;

*“Bila orang memiliki kemampuan dan keterampilan, wajib didorong untuk tahu malu dalam perilakunya, maka semuanya itu akan membawakan kejayaan bagi negeri. Semua orang yang lurus tepat, bila mendapatkan wewenang, akan membawakan kesejahteraan dan kelimpahan. Bila engkau tidak dapat menjadikan orang mampu menjamin keluarga yang dicintainya, mereka hanya akan terdorong kepada perilaku jahat; bila mereka tidak mencintai kebajikan, biar engkau menganugrahi kesejahteraan, mereka hanya akan menjerumuskanmu melakukan kekhilafan-kekhilafan.”*

Pada masa kampanye, saat janji-janji diutarakan agar rakyat memperoleh gambaran rencana masa depan, maka bagi orang yang tahu malu akan mengukur kemampuannya sehingga tidak membuat janji yang tidak dapat dipenuhi. Ada rasa malu jika janji tidak dapat ditepati.

Persiapan dalam penyelenggaraan Pemilu perlu adanya antisipasi terhadap upaya-upaya pembodohan rakyat. Partai-partai politik hendaknya menampilkan rancangan program kerja yang terukur dan mempersiapkan kader-kader yang memiliki ketrampilan yang dibutuhkan oleh negara. Pemilu jangan dijadikan kesempatan untuk memiliki kekuasaan tanpa tanggung jawab, melainkan harus dipandang sebagai kesempatan untuk membangun bangsa dan negara.

# BAB 02

---

.....BILA SEBAIKNYA MEMANGKU JABATAN, MEMANGKU JABATAN; BILA SEBAIKNYA BERHENTI, BERHENTI; BILA SEBAIKNYA BERLAMA-LAMA, BERLAMA-LAMA; BILA SEBAIKNYA BERCEPAT-CEPAT, BERCEPAT-CEPAT; DEMIKIANLAH *ZHISHENG KONGZI*. SEMUANYA ITU IALAH NABI - NABI JAMAN DAHULU DAN AKU BELUM DAPAT MENJALANI, TETAPI BILA HARUS MEMILIH, AKU AKAN BELAJAR SEPERTI KONGZI."

# KEIKUTSERTAAN UMAT KONFUSIANI DALAM PEMILU INDONESIA

## A. HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI PEMILIH

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat (demokrasi) dan juga hukum/regulasi sebagai negara hukum (nomokrasi) terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Negara Indonesia menjunjung tinggi hak-hak warga negara Indonesia. Berdasarkan hak-hak tersebut nasib bangsa dan Negara ditentukan, salah satunya adalah dengan berpartisipasi aktif menggunakan hak suara. Dalam *Sishu* dijelaskan tentang suara rakyat adalah suara Tian (Tuhan), maka penggunaan hak suara sebagai perwujudan dari suara rakyat untuk memilih wakil rakyat bukan hanya menjadi hak tetapi juga menjadi kewajiban setiap warga negara. Tanpa terkecuali umat Agama Khonghucu.

Agama Khonghucu memiliki pedoman konsep/prinsip *yinyang*. *Yinyang* dimaksudkan sebagai ajaran filosofi bahwa setiap hal di dunia walaupun berbeda tetap dapat harmonis. Konsep *yinyang* dalam Pemilu dapat diartikan sebagai seorang pemilih atau sebagai seorang terpilih (untuk menjadi wakil rakyat).

Seorang pemilih melambangkan *yang* dan seorang terpilih melambangkan *yin*. Walaupun demikian seorang pemilih dan seorang terpilih bukanlah dua hal yang diperdebatkan karena

berbeda. Keduanya berbeda dan tetap harmonis. Sebagai seorang pemilih berperan aktif dalam memilih calon terpilih, sedangkan sebagai seorang terpilih berperan aktif dalam menjalankan tugas demi para pemilihnya. Jadi dua hal tersebut haruslah dipandang sebagai satu kesatuan.

Beberapa landasan hak dan kewajiban sebagai pemilih, sebagai berikut;

## **1. Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28A-28J bab XI menjelaskan tentang hak-hak serta kewajiban-kewajiban sebagai warga negara. Konstitusi menegaskan perwujudan kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Penyelenggaraan pemenuhan hak asasi manusia di Negara Indonesia memerlukan keselarasan dengan ciri khas Negara Indonesia yaitu Pancasila.

## **2. Pancasila**

Pancasila sebagai dasar negara yang telah di rumuskan oleh *founding father* mempunyai lima sila, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
5. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kelima sila dalam Pancasila telah mencerminkan hak-hak sebagai warga negara. Berbicara dengan demokrasi khususnya Pancasila tertuang dalam sila ke-4 pancasila yang menjelaskan tentang kerakyatan, permusyawaratan, dan perwakilan. Artinya, suara rakyat harus terwakilkan oleh wakil rakyat. Jabatan wakil rakyat tersebut diperoleh dengan adanya Pemilu sebagai cerminan dari

permusyawaratan.

### 3. Pengamalan Sila ke -4 Pancasila

Pengalaman sila keempat dalam Pancasila dimaksudkan agar setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dimata hukum, oleh karena itu, setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam seluruh proses pengambilan keputusan khususnya Pemilu sebagai seorang yang memilih atau sebagai orang yang terpilih. Pemilu merupakan cerminan bahwa Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berasaskan pancasila yang menjunjung tinggi harkat martabat semua golongan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Contoh lainnya dari pengamalan Pancasila sila ke-4 terkandung dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1978 yang telah diperbarui dalam ketetapan MPR no. 1/MPR/2003, yaitu:

- Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
- Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
- Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
- Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

- Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
- Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang terpilih untuk melaksanakan pemusyawaratan.

#### 4. Berbakti

Ajaran tentang bakti merupakan pedoman hidup umat Khonghucu. Bakti dapat diartikan memuliakan hubungan. Memuliakan hubungan yang dimaksud adalah memuliakan hubungan dengan Tuhan (*Tian*) sebagai Khalik, memuliakan hubungan dengan bumi (*Di*) sebagai sarana hidup, memuliakan hubungan dengan manusia (*Ren*) sebagai sesama. Atau lebih dikenal dengan konsep *Sancai*.

Memuliakan hubungan dengan *Tian* dapat dilaksanakan dengan beribadah dan bersikap satya (*Zhong*). Memuliakan hubungan dengan sesama manusia dapat dilaksanakan dengan menjalin komunikasi yang baik dengan sesama manusia dan bersikap tepasalira (*Shu*). Memuliakan hubungan dengan bumi dapat dilaksanakan dengan merawat lingkungan (dalam konteks lebih luas dapat diartikan sebagai negara atau dunia).

Berbakti bukanlah menyangkut hubungan antara anak dan orangtua semata, tetapi berbakti itu dapat dilakukan terhadap negara. Implementasi dari berbakti kepada negara dalam kehidupan umat Khonghucu di Indonesia tersurat dalam kitab *Mengzi* jilid IB:15.3, sebagai berikut;

huò yuē   shì shǒu yě   fēi shēn zhī suǒ néng wéi   yě   xiào sǐ wù qù  
 或曰：世守也，非身之所能為(为)也。效死勿去。

*"Sebaliknya ada pula kata-kata, 'Tanah air harus dijaga dari generasi ke generasi, tidak boleh ditinggalkan sekedar pertimbangan pribadi. Bersiaplah untuk mati, tetapi jangan pergi.'*

Berbakti kepada negara dapat divisualisasikan dengan membuat negara dalam keadaan yang baik/kondusif yaitu dengan menjaganya dan tidak meninggalkannya. Peran warga negara khususnya umat Khonghucu adalah dengan memilih wakil rakyat/pemimpin yang baik dan mendukung program-programnya agar tercipta kondisi yang kondusif. Maka umat Khonghucu senantiasa berperan aktif dalam Pemilu sebagai salah satu cara untuk berbakti kepada negara.

## **B. APIT (AWASI, PILIH, IKUTI, TAGIH)**

Apatisme dalam proses Pemilu menjadi hal yang sangat tidak dianjurkan, dan itu cerminan dari warga negara yang tidak berbakti terhadap negaranya. Keikutsertaan dalam proses pemilihan wakil rakyat juga belum cukup syarat untuk menyandang kata warga negara yang berbakti. Memilih hanya suatu tindakan dalam rangka menggunakan hak suaranya sebagai warga negara.

Sebagai warga negara yang berbakti, berpartisipasi dalam Pemilu tidak selesai hanya dengan menggunakan hak suara. Partisipasi aktif dalam Pemilu harus tercermin pada kepedulian terhadap keberhasilan Pemilu secara utuh dan menyeluruh. Artinya, mempunyai tanggung jawab moral terhadap keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.

Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan Pemilu adalah persentase pemilih yang menggunakan hak suaranya. Oleh karena itu, setiap orang harus mau memberikan pandangan

dan pemahaman tentang pentingnya penggunaan hak suara dalam Pemilu.

Saat seluruh penulis dan *reviewer* buku lintas agama yang diselenggarakan oleh Bawaslu berdiskusi, maka teretuslah istilah “APIT”, sebagai salah satu calon icon untuk menjadi warga negara yang berbakti yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Pemilu. APIT terdiri dari; (1) Awasi, (2) Pilih, (3) Ikuti, (4) Tagih. Penjelasan APIT dalam agama Khonghucu sebagai berikut;

### 1. Awasi

Mengawasi merupakan salah satu cara dalam berpartisipasi aktif untuk menciptakan negara yang kondusif/baik. Dalam implementasi ‘awasi’ dapat diartikan dengan meneliti setiap calon wakil rakyat dari rencana kerjanya, visi-misinya, dan kualitasnya. Perhatikan pulacara wakil rakyat memperbaiki kekurangan-kekurangan mereka dengan hal-hal yang positif untuk memperoleh dukungan rakyat dengan cara yang baik.

### 2. Pilih

Memilih wakil rakyat sebagai perwujudan perwakilan suaranya juga merupakan cara dalam berpartisipasi untuk menciptakan negara yang baik dengan pemimpin yang berkualitas. Bagaimana cara memilih yang baik pernah dilakukan oleh Zhisheng Kongzi, dan hal tersebut dapat kita jadikan contoh didalam memilih seorang pemimpin. Tersurat dalam kitab Zhongyong bab XXVII:5, sebagai berikut:

zǐ yuē wú shuō xià lǐ qǐ bú zú zhēng yě wú xué  
 子曰：吾說(说)夏禮(礼)，杞不足徵(征)也；吾學(学)  
 yīn lǐ yǒu sòng cún yān wú xué zhōu lǐ jīn yòng zhī  
 殷禮(礼)，有宋存焉；吾學(学)周禮(礼)，今用之，  
 wú cóng zhōu  
 吾從(从)周。

Zhisheng bersabda, “Aku dapat membicarakan kesusilaan kerajaan Xia, tetapi Negara Qi tidak cukup memberi kenyataannya. Lalu Kupelajari Kesusilaan Kerajaan Yin; ternyata negeri Song masih dapat memeliharanya. Akhirnya Kupelajari Kesusilaan Kerajaan Zhou yang saat ini masih di jalankan. Maka Aku mengikuti Kerajaan Zhou.”

Zhisheng Kongzi merupakan seorang Zhisheng yang kritis didalam memilih tempatnya untuk menjalankan kesusilaan. Ayat diatas dimaksudkan ketika Zhisheng Kongzi menceritakan bagaimana Kerajaan Xia dan Yin, Negara Qi dan Negara Song bukanlah tempat yang cocok untuk Zhisheng Kongzi mengabdikan menjalankan kesusilaan, maka Zhisheng Kongzi memilih kerajaan Zhou.

Umat Khonghucu haruslah kritis didalam memilih pemimpin. Pemimpin yang dipilih oleh umat Khonghucu haruslah memenuhi kriteria seorang pemimpin yang berkualitas menurut Khonghucu. Kriteria pemimpin berkualitas terdapat dalam bab III dalam buku ini.

### 3. Ikuti

Mengikuti wakil rakyat merupakan perwujudan dari berpartisipasi aktif untuk menciptakan negara yang baik. Walaupun wakil rakyat yang kita ikuti belum tentu adalah pilihan utama kita, Bagaimana cara mengikuti yang baik tersurat dalam Mengzi jilid IIA:2.22, sebagai berikut;

kě yǐ shì zé shì kě yǐ zhǐ zé zhǐ kě yǐ jiǔ zé jiǔ  
可以仕則(則)仕，可以止則(則)止，可以久則(則)久，  
kě yǐ sù zé sù kǒng zǐ yě jiē gǔ shèng rén yě wú wèi  
可以速則(則)速，孔子也。皆古聖(聖)人也，吾未  
néng yǒu xíng yān nǎi suǒ yuàn zé xué kǒng zǐ yě  
能有行焉；乃所願(願)，則(則)學(學)孔子也。

*"... Bila sebaiknya memangku jabatan, memangku jabatan; bila sebaiknya berhenti, berhenti; bila sebaiknya berlama-lama, berlama-lama; bila sebaiknya bercepat-cepat, bercepat-cepat; demikianlah Zhisheng Kongzi. Semuanya itu ialah Nabi - Nabi jaman dahulu dan aku belum dapat menjalani, tetapi bila harus memilih, aku akan belajar seperti Kongzi."*

Zhisheng Kongzi menjelaskan bagaimana cara mengikuti seorang wakil rakyat atau pemimpin dengan baik sebagai perwujudan partisipasi warga negara. Caranya adalah ketika memangku jabatan atau menyuarakan rencana kerja/visi-misi yang baik dari wakil rakyat, lakukanlah. Atau, Ketika berhenti dari jabatan/menyuarakan rencana kerja/visi-misi dari wakil rakyat, berhentilah.

#### **4. Tagih**

Menagih rencana kerja/visi-misi dari wakil rakyat merupakan perwujudan dari partisipasi aktif untuk menciptakan negara yang baik. Didalam menagih janji wakil rakyat umat Khonghucu senantiasa mengikuti sabda *Zhisheng Kongzi* yaitu tentang keras kepada diri sendiri, namun, lemah lembut kepada orang lain. Artinya, umat Khonghucu akan selalu menuntut diri sendiri terlebih dahulu dan tidak menuntut orang lain (wakil rakyat tersebut), sehingga umat Khonghucu tidak hanya menunggu terealisasinya program/janji wakil rakyat tersebut tetapi berpartisipasi aktif melaksanakan program/janji tersebut jika dapat ia melakukannya. Jika tidak, cukuplah ia mengawasi program tersebut sembari dengan lemah lembut menyampaikannya ke wakil rakyat. *Zhisheng Kongzi* pernah bersabda bahwa seorang *Junzi* menuntut diri sendiri dan seorang rendah budi menuntut orang lain.

*Zhisheng Kongzi* pernah mengatakan bahwa memberikan harta kepada orang-orang dapat dinamai dengan murah hati. Mendidik

orang supaya menjadi pribadi yang baik dinamai Satya. Membantu dunia mendapatkan seorang pemimpin dapat dinamai berpericinta kasih. Menyerahkan dunia kepada seseorang itu mudah, tetapi mendapatkan seorang pemimpin sejati itulah yang sukar. Berdasarkan sabda *Zhisheng Kongzi* tersebut umat Khonghucu memahami bahwa mencari seorang pemimpin yang tepat diantara ratusan juta rakyat Indonesia adalah persoalan yang tidak mudah bahkan sukar untuk dilakukan. Maka, walaupun tidak dapat membantu mencari pemimpin yang tepat, umat Khonghucu ikut berpartisipasi mengikuti dan menagih program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan pemimpin yang baru.

## 5. Janganlah Golput

Tidak berpartisipasi aktif dapat dikatakan dengan golongan putih (golput). Mereka berarti warga negara yang tidak ikut dalam proses mengawasi, memilih, mengikuti, atau bahkan menagih janji rencana kerja atau program dari wakil rakyat yang terpilih. Jika demikian dapatkah dikatakan sebagai warga negara yang berbakti? ada sebuah peringatan untuk mengingatkan kita bahwa janganlah menjadi warga negara yang golput, dalam kitab *Mengzi* jilid IVA:1.10-1.11, tersurat;

shī yún tiān zhī fāng jué wú rán yì yì  
《詩(诗)》雲(云)：天(天)之方蹶(蹶)，無(无)然泄泄

*Di dalam Kitab Sanjak tertulis, 'Bila Tian hendak menghukum robohkan negerimu, janganlah kamu enak-enak.'*

yì yì yóu tà tà yě  
泄泄猶(犹)沓沓也。

*Kata 'enak-enak' itu berarti sikap 'masa bodoh'.*

Ayat diatas merupakan peringatan yang disampaikan oleh *Mengzi* kepada kita, bahwa sebagai warga negara janganlah masa bodoh atau acuh dengan perkembangan negara kita sendiri. Selain dapat dikatakan tidak berbakti, hal tersebut juga akan menciptakan lingkungan tempat tinggal yang tidak baik dan tidak harmonis sehingga tidak nyaman ditinggali. Dengan demikian, negara manakah yang akan menerima kita lagi?

### **C. HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI CALON WAKIL RAKYAT (TERPILIH)**

Suara rakyat adalah suara *Tian* (Tuhan Maha Esa), merupakan pedoman umat Khonghucu khususnya sebagai calon wakil rakyat untuk mewujudkan suara-suara rakyat yang diwakilkannya. Artinya, calon wakil rakyat menyampaikan keinginan-keinginan rakyat dalam bentuk rencana kerja/kegiatan/program dan visi-misi yang di dalamnya terkandung semangat untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan pancasila sila ke-5.

Keinginan-keinginan rakyat tersebut terwakilkan oleh calon wakil rakyat yang dipilihnya. Jika umat Khonghucu ingin terpilih sebagai wakil rakyat yang ingin memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu karena keinginan untuk dapat berbakti kepada negara dan menciptakan keadaan dimana rakyat Indonesia dapat bersatu sesuai dengan Pancasila sila ke-3.

Dasar untuk dapat bersatu seorang calon wakil rakyat haruslah menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin, seperti menolak politisasi sara (suku, agama, ras, dan antar golongan) dan tidak melakukan politisasi uang dalam berkampanye sehingga rakyat indonesia dapat bersatu dalam mendukung calon wakil rakyat.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka ada beberapa landasan hak dan kewajiban sebagai calon wakil rakyat (terpilih), sebagai berikut:

## 1. Menyusun Rencana Program Kerja

Menyusun rencana program kerja adalah hal penting yang harus dilakukan seorang calon wakil rakyat. Dengan menyusun rencana kerja maka akan dapat menetapkan visi-misi, dan dengan visi-misi maka akan menunjukkan kualitas calon wakil rakyat sebagai pemimpin sehingga mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Rencana program kerja harus berlandaskan keinginan-keinginan rakyat dan tidak lepas dari keinginan calon wakil rakyat untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Ada ayat yang tertuang dalam kitab dokumen sejarah suci umat agama Khonghucu yang membahas tentang bagaimana membuat rencana kerja yang baik. Dalam *Shujing* II.1:16, tersurat;

*"Baginda berbincang-bincang dengan kedua belas pengembala (rakyat), dan bertitah, 'Akan hal makanan-itu bergantung penilikan terhadap musim. Tariklah hati mereka yang ditempat yang jauh dan binalah kemampuan mereka yang ditempat dekat. Berikanlah penghargaan kepada mereka untuk menghadapi kesukaran dari orang yang licik; dengan demikian orang-orang Man dan Yi pun akan bersedia tunduk.'"*

Ayat tersebut menjelaskan 3 aspek penting dalam menyusun rencana program/kerja, yaitu :

1. Tariklah hati mereka yang ditempat yang jauh,
2. Binalah kemampuan mereka yang ditempat dekat,
3. Berikanlah penghargaan kepada mereka untuk menghadapi kesukaran.

Menarik hati mereka ditempat yang jauh dimaksudkan bahwa sebagai calon wakil rakyat dalam menyusun rencana program kerja tidak meninggalkan rakyat yang berada di daerah-daerah. Calon wakil rakyat dapat menyuarakan keinginan rakyat dalam bentuk program kerja yang menciptakan keadilan sosial yang merata bagi yang dekat maupun yang jauh, sehingga mereka senantiasa akan mendukung calon wakil rakyat.

Membina kemampuan mereka ditempat yang dekat dimaksudkan bahwa calon wakil rakyat menyusun rencana kerja yang berkaitan erat dengan peningkatan kemampuan dan kecakapan masyarakat sekitar. Dengan begitu, mereka memiliki kemampuan untuk dapat bekerja dengan baik dan digaji sesuai dengan kemampuannya serta dapat menciptakan lingkungan tempat tinggal yang baik. Dua hal tersebut akan membuat rakyat senantiasa mendukung calon wakil rakyat.

Berikanlah penghargaan kepada mereka untuk menghadapi kesukaran dimaksudkan bahwa calon wakil rakyat harus membuat rencana kerja yang dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat. Rencana kerja yang berbeda-beda tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Bagi mereka yang kurang mampu dalam bidang ekonomi berikanlah bantuan dana. Bagi mereka yang dapat menunjukkan prestasi diberikanlah penghargaan sehingga mereka bersemangat untuk meningkatkan prestasinya. Ciptakanlah lowongan kerja sehingga rakyat dapat membina kemampuannya dan dapat menghadapi kesukaran-kesukaran.

## **2. Menyelaraskan Visi-Misi Sesuai Kebutuhan Rakyat**

Setelah dapat menyusun rencana program kerja, hal terpenting lainnya yang harus dilakukan seorang calon wakil rakyat adalah

menetapkan visi-misi yang selaras dengan kebutuhan rakyat yang berbeda-beda. Sesuai dengan konsep *yinyang*, bahwa perbedaan itu harus diharmoniskan. Berdasarkan *yinyang* maka visi-misi yang ditetapkan oleh wakil rakyat sebaiknya dapat mewakili suara seluruh lapisan masyarakat. Ada ayat yang tertuang dalam kitab dokumen sejarah suci umat agama Khonghucu yang membahas tentang bagaimana seorang calon wakil rakyat menetapkan visi-misi yang selaras dengan kebutuhan rakyat. Dalam *Shujing V.XIII. III:13* tersurat:

*“Hendaklah demikian Anda, anakku yang muda, wujudkanlah di mana-mana betapa ketekunanku yang tidak mengenal lelah, dan dengarkanlah petunjukku untukmu; bagaimana membantu rakyat agar senantiasa memahami kebenaran yang lestari itu. Dalam hal ini bila Anda sendiri tidak bertekun maka kesempatan Anda tidak akan lestari. Bila Anda dengan tulus mengikuti Ayahandamu yang lurus dan tidak ada yang tidak mengikutiku, maka tidak ada orang yang berani mengabaikan perintahmu, berangkatlah Anda dengan penuh hormat, selanjutnya saya akan belajar memahami bercocok tanam. Perintahlah rakyat kita dengan penuh kemurahan hati. Maka tidak akan ada jarak jauh bagi mereka untuk datang kepadamu.”*

Ayat tersebut memiliki empat paragraf, dalam paragraf pertama dijelaskan tentang seorang calon wakil rakyat yang baru harus senantiasa meneladani calon wakil rakyat yang terdahulu, dengan mengambil visi-misi yang baik dan memperbaiki visi-misi yang kurang baik. Dengan meneladani figur yang lama, maka calon wakil rakyat akan dapat memperhatikan keinginan rakyat, dan dengan memperhatikan keinginan rakyat maka akan dapat diperoleh keadilan sosial dan pemerataan perekonomian. Semua itu dapat dimulai oleh calon wakil rakyat dengan menetapkan visi-misi dan rencana program kerja yang matang.

Paragraf kedua menyatakan bahwa bila seorang calon wakil rakyat tidak bertekun (secara terus-menerus) dalam menyuarakan keinginan rakyat maka keadilan sosial dan pemerataan perekonomian tidak akan terjadi. Paragraf ketiga dan keempat hanya menjelaskan tentang perlunya ketulusan dan kemurahan hati calon wakil rakyat dalam bekerja sebagai wakil yang menyuarakan keinginan rakyat, sehingga memperoleh dukungan dari rakyat.

### 3. Menunjukkan Kualitas sebagai Pemimpin

Seorang calon wakil rakyat haruslah dapat menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin dengan menyusun rencana program kerja yang dapat terealisasi dan visi-misi yang dapat menunjukkan keadilan sosial yang merata untuk rakyat Indonesia. Dalam kitab *Lunyu* jilid II:14, tersurat;

zǐ yuē jūn zǐ zhōu ér bù bǐ xiǎo rén bǐ ér bù zhōu  
 子曰：君子周而不比，小人比而不周。

*Zhisheng* bersabda, “Seorang *Junzi* mengutamakan kepentingan umum, bukan kelompok; seorang rendah budi (*Xiaoren*) mengutamakan kelompok, bukan kepentingan umum.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang pemimpin haruslah bersikap layaknya seorang *Junzi*, yang berarti mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan kelompok. Dengan mengutamakan kepentingan umum maka dapat menyelaraskan visi-misi dengan kebutuhan rakyat dan menyusun rencana program kerja yang baik sehingga calon wakil rakyat tersebut dapat menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin

### 4. Mencari Dukungan Rakyat

Seorang calon wakil rakyat tetap harus mencari dukungan rakyat. Mencari dukungan rakyat dapat dilakukan dengan berkampanye menyampaikan visi-misi dan rencana program/kegiatan

atau dapat menunjukkan kualitas sebagai pemimpin dengan berpartisipasi aktif dilingkungan masyarakat.

Zhisheng Kongzi bersabda bila seorang calon wakil rakyat/ pemimpin menyukai kesusilaan maka mudah untuk rakyat mengikutinya. Mendapatkan dukungan dari rakyat sangat mudah karena calon wakil rakyat tersebut telah menunjukkan kualitasnya. Tentang mendapatkan dukungan dari rakyat terdapat dalam kitab *Lunyu* Jilid XIII:4.2, tersurat;

shàng hǎo lǐ zé mǐn mò gǎn bú jìng shàng hǎo yì zé  
上好禮(礼), 則(则)民莫敢不敬; 上好義(义), 則(则)  
mín mò gǎn bù fú shàng hǎo xìn zé mǐn mò gǎn bú yòng qíng fū rú  
民莫敢不服; 上好信, 則(则)民莫敢不用情。夫如  
shì zé sì fāng zhī mǐn qiǎng fù qí zǐ ér zhì yǐ yān  
是, 則(则)四方之民, 襁(繼)負(负)其子而至矣, 焉  
yòng jià  
用稼?

*"Kalau seorang atasan dapat menyukai Kesusilaan, niscaya rakyat tiada yang berani tidak hormat; kalau seorang atasan menyukai Kebenaran, niscaya rakyat tiada yang berani tidak patuh; kalau seorang atasan menyukai sikap Dapat Dipercaya, niscaya rakyat tiada yang berani tidak menggunakan perasaan. Bila dapat berbuat demikian, dari ke empat penjuru rakyat dengan mendukung anak-anaknya akan datang kepadanya. Untuk apa ia bertanya-tanya tentang bertanam?"*

Ayat diatas menjelaskan tentang bagaimana sebaiknya seorang calon wakil rakyat mendapatkan dukungan. Dikatakan bahwa seseorang yang menyukai kesusilaan, kebenaran, dan sikap dapat dipercaya, maka rakyatpun datang untuk menaruh hormat, patuh, dan mendukung dengan perasaan. Maka dengan demikian rakyat dari yang dekat maupun yang jauh akan mendukung dan mengajak orang lain untuk mendukung calon wakil rakyat tersebut.

# BAB 03

---

**"DI DALAM KITAB TAISHI (PERNYATAAN BESAR) TERTULIS, 'TIAN MELIHAT SEBAGAI RAKYATKU MELIHAT, TIAN MENDENGAR SEBAGAI RAKYATKU MENDENGAR' DEMIKIANLAH MAKSUDNYA."**

# PEMIMPIN IDEAL SUDUT PANDANG KHONGHUCU

## A. KEPERCAYAAN RAKYAT

Khonghucu memandang politik sebagai suatu aturan hidup bernegara demi kebaikan bersama, membentuk pemerintahan yang baik, dan mengelola kekuasaan sebagai mandat rakyat. Lebih dari itu, bahwa ketika berbicara soal berbangsa dan bernegara, tidak akan lepas dari aspek tanah air, rakyat, dan pemerintahan. Bagaimana sepatutnya menjadi rakyat dan bagaimana menjadi pemimpin yang layak; inilah permasalahan hidup berbangsa dan bernegara. Di antara ketiga unsur tersebut, rakyat menjadi unsur sangat penting, menjadi sentral di antara tanah air dan pemerintahan.

Sub bab kepercayaan rakyat lebih difokuskan kepada rakyat dan pemerintahan. Berbicara rakyat sebagai unsur sentral berarti bicara tentang kepercayaan, karena tanpa kepercayaan rakyat sebuah negara tidak akan berdiri, dan sebuah pemerintahan tidak dapat berlangsung langgeng. Jika rakyat menjadi unsur sentral, maka kepercayaan rakyat menjadi faktor sekaligus aspek utama dalam konteks berlangsungnya suatu pemerintahan.

*Zhisheng Kongzi* menegaskan tentang pentingnya kepercayaan rakyat bagi suatu pemerintahan, sebagaimana tersurat di dalam *Lunyu* bab XII:7, sebagai berikut:

zǐ gòng wèn zhèng  
子 貢 ( 貢 ) 問 ( 问 ) 政 。

*Zigong bertanya tentang pemerintahan*

zǐ yuē zú shí zú bīng mǐn xìn zhī yī  
 子曰：足食，足兵，民信之矣。

*Zhisheng bersabda, "Harus cukup makan, cukup persenjataan, dan ada kepercayaan rakyat."*

zǐ gòng yuē bì bù dé yī ér qù yú sī sān zhě hé xiān yuē qù  
 子貢(貢)曰：必不得已而去，於(于)斯三者何先？曰：去  
 bīng  
 兵。

*Zigong bertanya, "Kalau terpaksa ada yang tidak dapat dipenuhi dari ketiganya, manakah yang dapat dilalukan?" "Lakukan persenjataan."*

zì gòng yuē bì bù dé yī ér qù yú sī èr zhě hé xiān yuē  
 貢(貢)曰：必不得已而去，於(于)斯二者何先？曰：  
 zì gǔ jiē yǒu sǐ mǐn wú xìn bù lì  
 自古皆有死，民無(无)信不立。

*Zigong bertanya, Kalau terpaksa ada yang tidak dapat dipenuhi dari kedua yang masih itu, manakah yang dapat dilalukan? "Lakukan makan. Sejak jaman kuno selalu ada kematian; tanpa kepercayaan rakyat, Negara tidak dapat berdiri."*

Ayat lain juga menegaskan tentang pentingnya kepercayaan rakyat bagi suatu pemerintahan, kitab *Daxue bab X:5*, tersurat:

shī yún yīn zhī wèi sàng shī kè pèi shàng dì yī jiān  
 詩(诗)雲(云)：殷之未喪(丧)師(师)，克配上帝；儀(仪)監  
 yū yīn jùn mìng bù yì dào dé zhòng zé dé guó  
 監(于)於(于)殷，峻命不易。道得眾(众)，則(则)得國(国)；  
 shī zhòng zé shī guó  
 失眾(众)，則(则)失國(国)。

*Di dalam Kitab Sanjak (Shijing) tertulis, "Sebelum Kerajaan Yin kehilangan kedaulatannya, laksana di dalam pimpinan Tian"*

*"Baiklah orang meneladan Kerajaan Yin dan insyaf betapa sukar mendapatkan Fiman yang mulia itu. Maka dikatakan 'yang mendapat (hati) rakyat akan mendapat Negara, yang kehilangan (hati) rakyat akan kehilangan Negara."*

Demokrasi berasal dari kata *demos* artinya rakyat dan *cratos* artinya pemerintahan. Jadi demokrasi berdasarkan pengertian katanya mengandung arti: 'pemerintahan rakyat.' Artinya, dalam sistem demokrasi kekuasaan/kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat. Dalam pelaksanaannya, suara rakyat itu akan disalurkan melalui wakil-wakilnya dipemerintahan yaitu DPR-MPR sebagai badan Legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai sebuah badan legislatif dalam tugas dan kewenangannya menyusun Undang-Undang harus mengacu dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Sementara Presiden sebagai eksekutif yang menjalankan pemerintahan harus mengacu pada Undang-Undang. Dari sini menjadi jelas, bahwa semua regulasi perundang-undangan merupakan representasi dari suara dan kepentingan rakyat.

*Abraham Lincoln*, Presiden Amerika Serikat ke-16 menyatakan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini senada dengan pernyataan yang tersurat dalam kitab *Mengzi* jilid VA: 5.8. "Suara rakyat adalah suara Tuhan", tersurat:

tài shì yuē tiān shì zì wǒ mǐn shì tiān tīng zì wǒ mǐn tīng  
太誓曰：天視(視)自我民視(視)，天聽(聽)自我民聽(聽)。  
cǐ zhī wèi yě  
此之謂(謂)也。

*"Di dalam Kitab Taishi (Pernyataan besar) tertulis, 'Tian melihat sebagai rakyatku melihat, Tian mendengar sebagai rakyatku mendengar' Demikianlah maksudnya."*

Ayat lain juga menegaskan tentang suara rakyat adalah suara Tuhan, kitab *Daxue* bab X:4, tersurat:

shī yún jié bǐ nán shān wéi shí yán yán hè hè  
 詩(诗)》雲(云)：節(节)彼南山，维石巖(严)巖(严)。赫赫  
 shī yīn mǐn jù ěr zhān yǒu guó zhě bú kě yǐ bú shèn pì  
 師(师)尹，民具爾(尔)瞻。有國(国)者不可以不慎，辟，  
 zé wéi tiān xià lù yī  
 則(则)為(为)天下僂矣!

*Di dalam Kitab Sanjak (Shijing) tertulis, "Pandang Gunung Selatan, tinggi megah batu di puncaknya, ingatlah akan kebesaranmu Menteri Yin, rakyat selalu melihatmu." Maka seorang yang memegang kekuasaan di dalam Negara tidak boleh tidak hati-hati, bila ia menyebel, dunia akan mengutuknya."*

Sehingga dapat disimpulkan betapa pentingnya mendapatkan hati dan kepercayaan rakyat dalam suatu pemerintahan, hal ini sesuai dengan ayat yang terdapat dalam kitab *Daxue* bab X:6:

shì gù jūn zǐ xiān shèn hū dé yǒu dé cǐ yǒu rén yǒu rén cǐ yǒu tǔ yǒu tǔ cǐ  
 是故君子先慎乎德。有德此有人，有人此有土，有土此  
 yǒu cái yǒu cái cǐ yǒu yòng  
 有財(財)，有財(財)此有用。

*"Maka seorang Junzi selalu mendahulukan kewaspadaannya dalam melakukan Kebijakan. Yang berkebijakan niscaya mendapat (hati) rakyat; yang mendapat rakyat niscaya mendapat daerah; yang mendapat daerah niscaya mendapat kekayaannya dan dengan kekayaan itu ia mendapat sumber perbelanjaan."*

## **B. PEMIMPIN SEBAGAI AYAH BUNDA RAKYAT**

Paradigma kepemimpinan dalam agama Khonghucu adalah sebagaimana diajarkan oleh *Zhisheng Kongzi* adalah berperan sebagai ayah bunda rakyat. *Kongzi* menegaskan ini dalam sebuah

sabdanya pada *Daxue* X:3, tersurat:

shī yún lè zhī jūn zǐ mǐn zhī fù mǔ mǐn zhī suǒ hào hào zhī  
詩(诗)雲(云): 樂(乐)只君子, 民之父母。民之所好好之,  
mǐn zhī suǒ wù wù zhī cǐ zhī wèi mǐn zhī fù mǔ  
民之所惡(恶)惡(恶)之, 此之謂(谓)民之父母。

*"Bahagialah seorang Junzi, karena dialah ayah bunda rakyat." Ia menyukai apa yang disukai rakyat dan membenci apa yang dibenci rakyat. Inilah yang dikatakan sebagai ayah bunda rakyat.*

Semangat membangun bersama orang disekitarnya merupakan pola manajemen kepemimpinan dalam agama Khonghucu, yang berakar pada pola membangun kebersamaan. Pola semacam itu akan mendorong setiap individu termasuk pemimpin itu sendiri untuk peduli kepada sesama dan lingkungan masyarakat sekitarnya, kemudian untuk menegakkan dan mencapai sukses secara bersama-sama.

Kepemimpinan masyarakat Tionghoa memiliki filosofi membangun kepercayaan dan kebersamaan mencapai pembagian keuntungan yang merata (*equal profitability*) dengan saling membantu antara produsen (*producers*), pedagang toko (*store owner*) dan pekerja-lapangan (*sales operational*) serta pelanggannya (*users, consumers*). Pola perdagangan mereka tidak sepenuhnya '*socialistic*', sebaliknya bukan pula sepenuhnya '*capitalistic*'.

Paham *Confucian business* semacam itu dipimpin oleh pola kepemimpinan proporsi berimbang (*zhongyong* 中庸) di semua strata. Tidak ada penumpukan keuntungan pada salah satu pihak, tetapi pola *business* yang menguntungkan masyarakat banyak maupun pelaku produksi dan pedagangnya sekaligus. Pola 'sama sama untung'.

Filosofi keuntungan yang terbagi bersama (*equal profitability*) itu bukan sekadar sebuah sistem pengaturan (*managerial system*)

tetapi didukung oleh sebuah landasan menghidupkan rasa saling percaya (*trusty*). Menjalankan sistem manajemen, bukan sekadar memakai perangkat sistem yang mekanis (*mechanic*) melainkan menggunakan gaya komunikatif yang hidup (*organic*).

Pola memimpin usaha perdagangan itu mereka wariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Ajaran emas dalam agama leluhur masyarakat Tionghoa, yang disebut Satya Tepasarira (*Zhongshu 忠恕*). Pola Satya Tepasarira itu adalah berlandas sabda *Zhisheng Kongzi* dalam *Lunyu VI:30.4*, tersurat:

fū rén zhě jǐ yù lì ér lì rén jǐ yù dá ér dá rén  
 夫仁者，己欲立而立人，己欲達(达)而達(达)人。

*“Seorang yang berpericintakasih ingin dapat tegak, maka berusaha agar orang lainpun tegak; ia ingin maju, maka berusaha agar orang lainpun maju.”*

### **C. KEDALAM SEBAGAI ZHISHENG, KELUAR SEBAGAI RAJA**

Pola kepemimpinan seorang *Junzi* dalam agama Khonghucu inipun dapat dipahami melalui seorang tokoh Taois yang memiliki pemahaman yang lebih dekat terhadap nilai internal dan eksternalnya. Dia adalah *Zhuangzi*, yang oleh beberapa literatur dikatakan sebagai penerus atau pengikut dari *Laozi* (老子) yang dipercaya mewariskan penulisan kitab *Daodejing* (道德经). Bahkan *Laozi* juga dipercaya pernah bertemu dengan *Zhisheng Kongzi* bersama dua orang muridnya.

*Zhuangzi* seorang cendekiawan *Dao* (道士) menilai kepemimpinan dalam ajaran Khonghucu sebagai fungsional kepemimpinan yang secara internal menunjukkan kearifan seorang *Zhisheng* (*Neisheng*)

内圣) dan eksternal membawakan kearifan seorang raja (*Waiwang* 外王).

*Zhuangzi* menilai perspektif kepemimpinan dalam ajaran *Zhisheng Kongzi* menunjuk aspek internal (*Nei*内) dan eksternal (*Wai*外). Secara internal mensifatkan ketulusan, kemuliaan karakter *Sheng* (圣), dan kearifan seorang *Zhisheng*. Secara eksternal mensifatkan kekuatan menggerakkan, mengendalikan bercirikan karakter *Wang* (王), ketegasan seorang raja. Inilah yang disebut *Zhuangzi* tentang kepemimpinan perspektif Khonghucu: *Neisheng, Waiwang* (内圣外王).

Sebagai kesimpulan, adapun untuk menerapkan pola kepemimpinan "*Neisheng, Waiwang*" terdapat di dalam empat kitab suci yang pokok (*Sishu*四书) berdasar sabda-sabda *Zhisheng Kongzi* yang dicatat oleh cucu maupun para murid beliau.

Pertama, bersumber pada nilai ketulusan iman (*Chengxin*诚信) dalam ajaran *Zhisheng Kongzi*. "Iman itu tidak hanya menyempurnakan diri-sendiri, tetapi juga menyempurnakan segenap wujud. Cintakasih (*Ren*仁) itulah untuk menyempurnakan diri, kebijaksanaan (*Zhi*智) itulah untuk menyempurnakan segenap wujud."

Sebagaimana diungkapkan oleh *Zhuangzi* tadi, maka dalam perspektif agama Khonghucu posisi seorang pemimpin itu punya landasan tanggung-jawab secara internal dan external. Internal berlandaskan tanggung-jawab yang ikhlas berkorban penuh cintakasih (仁). Eksternal tegas bertanggung jawab atas perjuangan bersama anak-buah dengan penuh bijaksana (智). Pemimpin tidak hanya menyempurnakan prestasi dan reputasi pribadi (*individual-succeed*) tapi menjadi seorang yang mampu meneladani, serta mengayomi prestasi dan reputasi anggota tim (*success in togetherness*).

Kearifan seorang pucuk pimpinan adalah bahwa seorang pemimpin itu seyogyanya mampu memiliki kepekaan membaca perasaan

dan selalu mempertimbangkan dampak kepemimpinannya itu bagi sesama hidup yang lain. ***"Apa yang tidak kita inginkan, janganlah dilakukan terhadap orang lain."***

Seorang pemimpin pertama-tama memang wajib memberdayakan diri-sendiri dan lingkungan kerjanya terlebih-dahulu. Dalam sudut pandang agama Khonghucu hal ini disebut tahap awal Jalan Suci atau 'tahap menggemilangkan kebajikan sendiri' (*Zaiming Mingde* 在明明德). Namun demikian masih ada dua tahapan Jalan Suci yang menjadi tanggung jawab moral seorang pemimpin, yaitu terhadap lingkungan hidup sekitar dan nilai kebersamaan hidup yang jauh lebih luas.

Ajaran Besar (*Daxue* 大学) selain mengajarkan perlunya tahap Jalan Suci pertama di atas (*Zaiming Mingde* 在明明德), juga mengajarkan sebuah sistem kepemimpinan yang menembus batasan prestasi, reputasi dan kepentingan ego-kelompoknya.

Seorang pemimpin harus menembus batas kepentingan ego-kelompoknya dan melanjutkannya dengan tahap Jalan Suci kedua, yaitu bertanggung jawab secara sosial-religius dan kepentingan sesama hidup lainnya (*Zaiqinmin* 在亲民).

Bahkan setelah Jalan Suci tahap kedua itu wajib pula diabdikan pada tahap ketiga sebagai *spiritual-responsibility* 'menuju puncak kebaikan' (*Zaizhiyu Zhishan* 在止於至善).

Seorang pemimpin, bukan sekadar bertanggung jawab bagi kelompok kerjanya sendiri, atau orang-orang yang mau mengikuti pola kerjanya saja, tetapi wajib menjadi teladan bagi seluruh anggota kelompok-kerjanya (staf organisasi, anggota dewan, menteri kabinet) untuk mengabdikan dan melayani, mengayomi, menyejahterakan, dan menegakkan keadilan sosial-religius bagi segenap konstituen, masyarakat luas, atau bangsanya.

Di zaman modern ini sejumlah tokoh cendekiawan agama Khonghucu di berbagai negara juga memberikan pandangannya tentang masalah kualitas manusia, termasuk para pemimpin. Bagi seorang pemimpin dalam perspektif Khonghucu, sikap cintakasih (仁) merupakan suatu bentuk tanggung jawab kepada masyarakat (*one's responsibility to the society*).

Siapun termasuk seorang pemimpin masyarakat melalui pemahaman dan penerapan pembinaan diri dalam ajaran agama Khonghucu akan mampu menjadi seorang pemimpin yang berpericintakasih (*humanist-leader*). Profesor TuWei-ming, di dalam salah sebuah pemaparan kuliahnya di Universitas Korea menegaskan tentang perikemanusiaan /cintakasih (仁) sebagai fokus pendidikan keagamaan Khonghucu. "*Confucian learning, as 'learning for the sake of the self,' is more than the acquisition of knowledge or the internalization of skills; it is primarily character building.*"

Karakter kepemimpinan juga dibentuk melalui suatu pendidikan yang terpadu, yang jika kita kaji bagaimana Zhisheng besar Kongzi mengajar murid-murid Ru dalam enam disiplin ilmu: ibadah, seni musik, seni memanah, seni mengendarai kereta, seni kaligrafi, dan seni hitung/eksakta. Profesor Tu Wei-ming sebagai *education expert* mengungkap sebagai berikut, "*Although the martial spirit is incorporated in the mastery of the six arts (ritual, music, archery, charioteering, calligraphy, and arithmetic), the focus of Confucian education is the cultivation of humanity (ren).*"

Prof. Tu Wei-ming juga berbicara tentang pentingnya memahami perlunya memperbaiki perspektif humanisme (Ren人) itu dengan menempatkan sesama kita bukan sebagai obyek. Kita coba memancarkan semangat berkomunikasi dalam jarak yang pantas sebagai bagian integral sebuah komunikasi antara kita dengan sesama dalam posisi subyek berkomunikasi dengan sesama subyek. Diungkapkan pula, "*Ideally, in the inclusive humanistic perspective, no human being is treated as an object; indeed nothing is outside the orbit of human concern.*"

Prof. Yu Dan, seorang dosen yang sedang populer dikalangan akademik Tiongkok maupun dunia internasional, menjawab (sejumlah pertanyaan) dengan menegaskan sebuah pesan tentang pentingnya mengambil makna yang jernih dari ajaran 'lama' di dalam kitab Sabda Suci (*the Analects/Lunyu* 论语). Ajaran keagamaan Khonghucu akan mengangkat pembicaraan perihal sebuah masyarakat yang harmonis, baik melalui melatih bersikap memahami sesama (*exercising tolerance of others*) ataupun menjaga suasana mental kita agar selalu berada dalam sikap 'seimbang' (*zhong* 中) sehingga segala sesuatu menjadi 'harmonis' (*he* 和).

*"The host asked her whether The Analects was required reading for a harmonious society, and Yu Dan responded, "Actually, The Analects are quite mainstream; that is, many things in The Analects are ideas brought up by our harmonious society today.".....Looking through relevant explanations in her Insights, perhaps we can find an awakening. Yu Dan says, "China has always seen harmony as beautiful. And what is true harmony? Exercising tolerance of others, blending together while sustaining different voices and differences of opinion" (p 62); "The mental state of the doctrine of the mean is everything situated in harmony. This harmony is when all heaven and earth is in its place (p 110)."*

Akhirnya fungsi kepemimpinan dalam perspektif Khonghucu tidak lepas dari kemampuan menata kehidupan pribadi, sosial religius, meliputi lima Jalan Suci Kemasyarakatan: pemimpin dan yang dipimpin, orangtua dan anak, suami istri, kakak dan adik, serta kawan dan sahabat. Untuk terjalin harmonisnya kelima hubungan tersebut, pedoman yang diberikan dalam agama Khonghucu adalah tiga kebajikan, yaitu (1) Kebijaksanaan (*Zhi* 智), (2) Cintakasih (*Ren* 仁), Keberanian (*Yong* 勇).

## D. KETELADANAN DAN PENGAYOMAN

Kepemimpinan dalam perspektif Khonghucu adalah kepemimpinan yang berakar pada Jalan Suci *Zhisheng Kongzi* yang merupakan kepemimpinan *parental (Minzhi Fumu)*, karakter pemimpin yang mengutamakan keteladanan dan pengayoman. Dalam hal ini hubungan seorang pemimpin dengan masyarakat yang mengangkatnya diharapkan memenuhi kedua unsur orangtua terhadap anak-anaknya. Ketulusan, keikhlasan berkorban seperti seorang ibu, maupun keteladanan dan ketegasan untuk mengayomi seperti seorang ayah adalah perpaduan karakter yang diperlukan anak-anaknya. Begitupula masyarakat/rakyat jelata dalam sudut pandang ini memerlukan pemimpin yang memenuhi kriteria layaknya sepasang orangtua, keibuan sekaligus kebabakan, *Yin* sekaligus *Yang*.

Secara khusus di dalam ajaran keagamaan yang diajarkan agama Khonghucu terdapat lima Jalan suci kemasyarakatan (*Wudadao* 五达道), meliputi:

1. *Junchen*      君臣= Jalan suci antara pemimpin dan pembantunya.
2. *Fuzi*        父子= Jalan suci antara orangtua dan anak.
3. *Fufu*        夫妇= Jalan suci antara suami dan isteri.
4. *Xiongdi*    兄弟= Jalan suci antara kakak dan adik.
5. *Pengyou*    朋友= Jalan suci antara lawan dan sahabat.

Dalam *Wujing* dan *Sishu* (五经, 四书) tertulis, bahwa untuk terjalinnnya secara harmonis kelima Jalan suci di atas, diletakkan pedoman: Tripusaka Kebajikan (*Sandade* 三达德), meliputi: (1) Kebijaksanaan (*Zhi* 智), (2) Cintakasih (*Ren* 仁), Keberanian (*Yong* 勇).

Hal tersebut dalam jalinan kehidupan sosial lazim pula disebut: tiga simpul-ikatan/jalinan (*Sangang* 三纲), yang terdiri dari: 1. ayah anak

(Fuzi 父子), 2. suami isteri (Fufu 夫妇) dan 3. pemimpin pembantu (Junchen 君臣).

Dalam kesempatan lain Zhisheng Kongzi menegaskan bahwa hakikat memerintah atau memimpin adalah ‘meluruskan.’ Bila pemimpin lurus, siapa berani berbuat tidak lurus. Tersurat dalam *Daxue* Bab X:21, sebagai berikut;

wèi yǒu shàng hǎo rén ér xià bù hǎo yì zhě yě wèi yǒu hǎo yì qí shì  
 未 有 上 好 仁 ， 而 下 不 好 义 (义) 者 也 ； 未 有 好 义 (义) ， 其 事  
 bú zhōng zhě yě wèi yǒu fǔ kù cái fēi qí cái zhě yě  
 不 终 (终) 者 也 ； 未 有 府 库 (库) 财 (财) ， 非 其 财 (财) 者 也 。

*Belum pernah ada kegemaran pihak atas akan laku cintakasih mengakibatkan pihak bawah tidak menyukai Kebenaran. Belum pernah ada orang yang menyukai Kebenaran tidak menunaikan tugasnya baik-baik, dan tidak akan terjadi harta yang berada di dalam gudang Negara bukan milik Negara.*

Ayat lain juga menegaskan tentang pemerintahan, kitab *Lunyu* jilid XII:19, tersurat:

jì kāng zǐ wèn zhèng yú kǒng zǐ yuē rú shā wú dào yǐ  
 季 康 子 问 (问) 政 於 (于) 孔 子 曰 ； 如 杀 (杀) 无 (无) 道 ， 以  
 jiù yǒu dào hé rú  
 就 有 道 ， 何 如 ？

*Jikangzi bertanya tentang pemerintahan kepada Zhisheng Kongzi, “Bagaimanakah bila dibunuh orang-orang yang ingkar dari Jalan Suci, untuk mengambangkan Jalan Suci?”*

Selanjutnya ayat lainnya tentang kebajikan seseorang dalam berbuat baik atau bajik, kitab *Lunyu* Jilid XII:18, tersurat:

kǒng zǐ duì yuē zǐ wéi zhèng yān yòng shā zǐ yù shàn ér mǐn  
孔子對(对)曰：子為(为)政，焉用殺(杀)？子欲善，而民  
shàn yī jūn zǐ zhī dé fēng xiǎo rén zhī dé cǎo cǎo shàng zhī fēng  
善矣！君子之德，風(风)，小人之德，草；草，上之風  
bì yǎn  
(风)，必偃。

*Zhisheng Kongzi menjawab, "Kamu memangku jabatan pemerintahan mengapa harus membunuh? Bila kamu berbuat baik, niscaya rakyat akan mengikuti baik. Kebajikan seorang pembesar laksana angin, dan Kebajikan rakyat laksana rumput; ke mana angin bertiup, ke situ rumput mengarah!"*

Ayat lainnya juga menjelaskan tentang perbuatan dalam pemerintahan, yaitu tidak pernah merasa lelah, kitab *Lunyu* jilid XIII:1, tersurat:

zǐ lù wèn zhèng zǐ yuē xiān zhī láo zhī qǐng yì yuē wú  
子路問(问)政。子曰：先之，勞(劳)之。請(请)益。曰：無  
juàn  
(无)倦。

*Zilu bertanya tentang pemerintahan. Zhisheng bersabda, "Jadikanlah dirimu pelopor dalam berjerih payah melaksanakan tugas." Zilu minta penjelasan. Zhisheng bersabda, "Pantang merasa capai."*

Dalam *Shujing* IV.3 dan *Shujing* V tersurat bahwa perilaku orang baik akan mendapatkan karunia Tian seperti baginda *Chengtang* seorang sosok teladan sebagai pemimpin rakyat, sebagai berikut:

yuē yǔ xiǎo zǐ lǚ gǎn yòng xuán mù gǎn zhāo gào yú huáng huáng hòu  
曰：予小子履，敢用玄牡，敢昭告於(于)皇 皇 後(后)  
dì yǒu zuì bù gǎn shè dì chén bú bì jiǎn zài dì xīn zhèn gōng yǒu zuì  
帝：有罪不敢赦，帝臣不蔽，簡(简)在帝心！朕躬有罪，  
wú yǐ wàn fāng wàn fāng yǒu zuì zuì zài zhèn gōng  
無(无)以萬(万)方；萬(万)方有罪，罪在朕躬。

*Ketika Chengtang melakukan sembahyang kepada Tian berkata, "HambaMu yang kecil Lu, memberanikan diri mempersembahkan korban lembu hitam, dan dengan ini memberanikan diri menyatakan kepadaMu Tian Yang Maha Besar, bahwa kepada orang yang jahat itu hambaMu tidak berani mengelakkan diri untuk tidak menghukumnya. Kebaikan maupun keburukan hamba, juga tidak berani hamba menyembunyikannya. Akan hal ini, Tian sendiri mengetahuinya. Kalau hamba berdosa janganlah ditimpakan hukuman kepada segenap rakyat dan bila rakyat berbuat dosa biarlah dihukumkan ke atas diri hamba."*

zhōu yǒu dà lài                      shàn rén shì fù  
 周有大賚(賚)，善人是富。

*Ketika Raja Negeri Zhou membagi-bagikan hadiah besar, orang-orang yang baik mendapatkan paling banyak.*

## **E. MEMBENARKAN NAMA-NAMA**

Nama tentulah harus sesuai dengan yang dinamai, dan kata-kata harus sesuai dengan perbuatannya. Maka, setelah sebuah negara berdiri karena ada kepercayaan rakyat, maka hal pertama yang harus dilakukan untuk mengatur dan menjalankan sebuah pemerintahan adalah 'membenarkan nama-nama.'

Tentang hal ini, *Zhisheng Kongzi* menjelaskan kepada salah seorang muridnya bahwa bilamana nama-nama tidak benar, maka pembicaraan tidak akan sesuai dengan hal yang sesungguhnya, maka segala urusan tidak dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tersurat dalam kitab *Lunyu* jilid XIII:3, tersurat:

zǐ lù yuē wèi jūn dài zǐ ér wéi zhèng zǐ jiāng xī xiān  
 子路曰：衛(卫)君待子而為(为)政，子將(将)奚先？

Zilu bertanya, "Kalau Pangeran Wei mengangkat Guru dalam pemerintahan, apakah yang akan Guru lakukan lebih dahulu?"

zǐ yuē bì yě zhèng míng hū  
子曰：必也正名乎！

Zhisheng bersabda, "Akan Kubenarkan lebih dahulu nama-nama."

zǐ lù yuē yǒu shì zāi zǐ zhī yū yě xī qí zhèng  
子路曰：有是哉？子之迂也。奚其正？

Zilu berkata, "Mengapakah demikian? Jawaban Guru jauh dari persoalannya. Mengapakah perlu lebih dahulu membenarkan nama-nama."

zǐ yuē yě zāi yóu yě jūn zǐ yú qí suǒ bù zhī gài què rú  
子曰：野哉，由也！君子於其所不知，蓋闕如也。

"Oh, You, sungguh kasar engkau! seorang Junzi bila belum memahami sesuatu tidak lekas-lekas mengeluarkan pendapat."

míng bù zhèng zé yán bù shùn yán bù shùn zé shì bù  
名不正，則言不順；言不順，則事不  
chéng  
成；

"Bilamana nama-nama tidak benar, maka pembicaraan tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya, maka segala urusan tidak dapat dilakukan baik-baik."

shì bù chéng zé lǐ yuè bù xìng lǐ yuè bù xìng  
事不成，則禮樂不興；禮樂不興  
zé xíng fá bù zhōng xíng fá bù zhōng zé mín wú  
(兴)，則刑罰不中；刑罰不中，則民無  
suǒ cuò shǒu zú  
(无)所措手足。

*“Bila pekerjaan tidak dapat dilakukan baik-baik, kesusilaan dan musik tidak dapat berkembang. Bila kesusilaan dan musik tidak dapat berkembang, hukum pun tidak dapat dilakukan dengan tepat. Bila hukum tidak dapat dilakukan dengan tepat, maka rakyat akan merasa tiada tempat untuk menaruhkan kaki dan tangannya.*”

gù jūn zǐ míng zhī bì kě yán yě yán zhī bì kě xíng yě jūn zǐ yú qí yán  
 故君子名之必可言也，言之必可行也。君子於(于)其言  
 wú suǒ gōu ér yǐ yǐ  
 ，無(无)所苟而已矣!

*“Bagi seorang Junzi nama itu harus sesuai dengan yang diucapkan dan kata-kata itu harus sesuai dengan perbuatannya. Itulah sebabnya seorang Junzi tidak gampang-gampang mengucapkan kata-kata.”*

Dalam pemerintahan suatu negara terdapat pembagian tugas kerja. Seorang kepala negara akan membentuk kementerian yang berfungsi melakukan pekerjaan sesuai dengan visi dan misi pemerintahan. Maka penyebutan nama kementerian sebaiknya disesuaikan dengan fungsi pekerjaan yang merupakan tanggung jawab kementerian tersebut.

Setelah menentukan nama-nama kementerian, maka tempatkan orang sesuai dengan kecakapan dan kemampuannya. Bagi seorang pemimpin, baik sebagai kepala negara dan/atau sebagai kepala pemerintahan menjadi penting untuk dapat menempatkan jabatan-jabatan dibawahnya kepada orang yang tepat, memiliki kualitas profesional di bidangnya masing-masing (*the right man in the right place, the right man in the right job*). Hal ini telah dikatakan oleh Zhisheng Kongzi dalam kitab *Lunyu* jilid XIII:2:

gù jūn zǐ míng zhī bì kě yán yě yán zhī bì kě xíng yě jūn zǐ yú qí yán  
 故君子名之必可言也，言之必可行也。君子於(于)其言  
 wú suǒ gōu ér yǐ yǐ  
 ，無(无)所苟而已矣!

Zhonggong sebagai pengurus rumah tangga Keluarga Ji, bertanya tentang pemerintahan.

Zhisheng bersabda, "Tempatkanlah orang-orang yang sesuai dengan kecakapannya; maafkanlah kesalahan-kesalahan kecil, dan angkatlah orang-orang bijaksana."

Untuk mengetahui kemampuan dan kecakapan seseorang dalam memangku jabatan, dapat dimulai dengan orang yang dikenal memiliki reputasi yang baik dibidangnya dan menggali informasi dari banyak pihak mengenai orang-orang yang lainnya. Dalam hal ini kitab *Lunyu bab XIII:2*, menyuratkan:

yuē yān zhī xiàn      cái ér jǔ      zhī yuē jǔ      ěr suǒ zhī ěr  
曰：焉知賢(賢)才而舉(舉)之？曰：舉(舉)爾(爾)所知，爾  
suǒ bù zhī rén qí shě zhǔ  
(爾)所不知，人其舍諸(諸)？

"Bagaimanakah dapat mengetahui kecakapan seseorang untuk memangku suatu jabatan?" Zhisheng bersabda, "Angkatlah mereka yang kau ketahui; yang belum kau ketahui, kiranya orang lain dapat memberikan keterangan tentangnya."

## F. PEDOMAN PEMERINTAHAN

Zhisheng Kongzi memberikan pedoman penting dalam menjalankan pemerintahan. Ada hal 'indah' yang harus dijaga, dan ada hal buruk yang harus dibuang. Bagaimana dapat bermurah hati tetapi tidak memboros; menyuruh orang berjerih payah, tetapi tidak menyebabkan sesal; mempunyai keinginan tetapi tidak tamak; berwibawa tetapi tidak sombong; dan keras tetapi tidak buas, ini kiranya lima hal indah yang perlu dijaga. Kekejaman, kesewenang-wenangan, ketidak

tegasan, dan keraguan dalam memberi sesuatu, inilah empat hal buruk yang harus dibuang jauh-jauh dalam sebuah pemerintahan.

Lebih jelasnya, *Zhisheng Kongzi* memberikan pandangan tentang lima yang indah dan empat yang buruk, tersurat dalam kitab *Lunyu* jilid XX:2, tersurat:

zǐ zhāng wèn yú kǒng zǐ yuē hé rú sī kě yǐ cóng zhèng yǐ  
 子張(張)問(問)於(于)孔子曰：何如斯可以從(從)政矣？

*Zizhang bertanya kepada Zhisheng Kongzi, "Bagaimanakah cara menjalankan pemerintahan sebaik-baiknya?"*

zǐ yuē zūn wǔ měi bìng sì è sī kě yǐ cóng zhèng yǐ  
 子曰：尊五美，屏四惡(惡)，斯可以從(從)政矣。

*Zhisheng menjawab, "Junjunglah lima yang indah dan buanglah empat yang buruk, dengan cara ini akan dapat menjalankan pemerintahan sebaik-baiknya."*

zǐ zhāng yuē hé wèi wǔ měi zǐ yuē jūn zǐ huì ér bù fèi lǎo  
 子張(張)曰：何謂(謂)五美？子曰：君子惠而不費(費)，勞  
 ér bú yuàn yù ér bú tān tài ér bù jiāo wēi ér bù měng  
 (勞)而不怨，欲而不貪(貪)，泰而不驕(驕)，威而不猛。

*Zizhang bertanya, "Apakah yang dimaksud dengan lima yang indah itu." Zhisheng bersabda, "Seorang Junzi bermurah hati tetapi tidak memboros; menyuruh orang berjerih payah, tetapi tidak menyebabkan sesal; mempunyai keinginan tetapi tidak tamak; berwibawa tetapi tidak sombong; dan keras tetapi tidak buas."*

zǐ zhāng yuē hé wèi huì ér bù fèi zǐ yuē yīn mín zhī suǒ lì  
子張(張)曰：何謂(謂)惠而不費(費)?子曰：因民之所利  
ér lì zhī sī bú yì huì ér bù fèi hū zé kě láo ér láo  
而利之，斯不亦惠而不費(費)乎?擇(擇)可勞(勞)而勞(勞)  
zhī yòu shuí yuàn yù rén ér dé rén yòu yān tān jūn zǐ wú  
之，又誰(誰)怨?欲仁而得仁，又焉貪(貪)?君子無(無)  
zhòng guā wú xiǎo dà wú gǎn màn sī bú yì tài ér bù jiāo  
眾(眾)寡，無(無)小大，無(無)敢慢，斯不亦泰而不驕  
hū jūn zǐ zhèng qí yī guān zūn qí zhān shì yǎn rán rén wàng  
(驕)乎?君子正其衣冠，尊其瞻視(視)，儼(儼)然人望  
ér wèi zhī sī bú yì wēi ér bù měng hū  
而畏之，斯不亦威而不猛乎

Zizhang bertanya, "Apakah yang dimaksud dengan bermurah hati tetapi tidak memboros?" Zhisheng bersabda, "Keuntungan yang diperoleh rakyat dirasakan sebagai keuntungan sendiri. Bukankah ini bermurah hati tetapi tidak memboros? Dipilih hal-hal yang perlu disertai jerih payah, barulah disuruh mengerjakan. Siapakah yang akan menyesali? Menginginkan pericintakasih dan mendapatkan cintakasih itu, bagaimanakah bisa tamak? Seorang Junzi, terhadap orang banyak atau sedikit, urusan kecil atau besar tidak berani meremehkan; maka bukankah ia berwibawa tetapi tidak sombong? Seorang Junzi rapi pakaian dan topinya, matanya tidak sembarang melihat, sehingga orang yang memandangnya menaruh segan; bukankah ia bersikap keras tetapi tidak buas?"

zǐ zhāng yuē hé wèi sì è zǐ yuē bú jiāo ér shā wèi  
子張(張)曰：何謂(謂)四惡(惡)?子曰：不教而殺(殺)謂  
zhī nuè bú jiè shì chéng wèi zhī bào màn lìng zhì qī wèi zhī  
(謂)之虐；不戒視(視)成謂(謂)之暴；慢令致期謂(謂)之  
zéi yóu zhī yǔ rén yě chū nà zhī lìn wèi zhī yǒu  
賊(賊)；猶(猶)之與(與)人也，出納(納)之吝，謂(謂)之有  
sī  
司。

Zizhang bertanya, "Apakah yang dimaksud dengan empat yang Buruk?" Zhisheng bersabda, "Dengan tanpa memberi pendidikan lalu menjatuhkan hukuman berat, ini dinamai kejam. Dengan tidak

*memberi kesempatan bersiap lalu menghendaki pekerjaan sempurna, ini dinamai sewenang-wenang. Dengan tidak memberi perintah tegas, kemudian meminta pekerjaan segera selesai, ini dinamai pencuri. Dan memberi sesuatu tetapi ragu-ragu untuk menyerahkan, ini dinamai pelit.”*

## **G. PEMERINTAHAN YANG BERKEBAJIKAN**

### **1. Laksana Bintang Utara**

Pada zaman dahulu, pemimpin negara atau raja dapat diartikan sebagai *Zhisheng*, karena para raja ini sudah seharusnya dapat mewakili sifat-sifat *Tian* di muka bumi ini yang dapat menggerakkan, mengarahkan, dan mengamalkan *De* (Kebajikan) yang besar kepada rakyat demi tercapainya kesejahteraan bersama. Begitu besarnya pengaruh raja terhadap rakyat apabila pemerintahan berdasarkan *De*.

*Zhisheng Kongzi* mengatakan bahwa pemerintahan yang berdasarkan kebajikan itu laksana bintang Kutub Utara tetap di tempatnya, dan bintang-bintang lain mengelilinginya. Artinya, pemerintahan yang berlandaskan kebajikan akan menjadi petunjuk, pedoman, penengah bagi semua orang yang menjadi rakyatnya. Dalam kitab *Lunyu* jilid II:1, tersurat

zǐ yuē wéi zhèng yǐ dé pì rú běi chén jū qí suǒ ér zhòng  
 子曰：為(为)政以德。譬如北辰，居其所，而眾(众)  
 xīng gòng zhī  
 星共之。

*Zhisheng* bersabda, “Pemerintahan yang berdasarkan Kebajikan itu laksana bintang Kutub Utara tetap ditempatnya dan bintang-bintang lain mengelilinginya.”

Ayat lain juga menegaskan tentang bagaimana seorang *Junzi* memandang kebaikan, kitab *Daxue* babX:12, tersurat:

chǔ shū yuē chǔ guó wú yǐ wéi bǎo wéi shàn yǐ wéi  
楚書(书)曰：楚國(国)無(无)以爲(为)寶(宝)，惟善以爲  
bǎo  
(为)寶(宝)。

Di dalam Kitab Kerajaan Chu tertulis, “Negeri Chu tidak memandang suatu benda sebagai mestika, hanya Kebaikan sajalah yang dipandang sebagai mestika.”

Selanjutnya ayat lain menegaskan tentang ujung dan pokok, kebajikan sebagai pokok, kekayaan sebagai ujung, dan tersebarannya kekayaan akan menyatukan rakyat, kitab *Daxue* babX:7-9, tersurat:

dé zhě běn yě cái zhě mò yě  
德者，本也；財(财)者，末也。

Kebajikan itulah yang pokok dan kekayaan itulah yang ujung.

wài běn nèi mò zhēng mín shī duó  
外本内末，争民施夺(夺)。

Bila mengabaikan yang pokok dan mengutamakan yang ujung, itulah meneladani rakyat untuk berebut.

shì gù cái jù zé mín sàn cái sàn zé mín jù  
是故財(财)聚則(则)民散，財(财)散則(则)民聚。

Maka penimbunan kekayaan itu akan menimbulkan perpecahan diantara rakyat; sebaliknya tersebarannya kekayaan akan menyatukan rakyat.

Selanjutnya ayat lain menegaskan tentang hubungan seorang pemimpin dan pembantunya (bawahannya), dalam kitab *Lunyū* jilid III:19, tersurat:

dìng gōng wèn      jūn shǐ chén      chén shì jūn      rú zhī hé  
 定公問(问)：君使臣，臣事君，如之何？

*Pangeran Ding* bertanya, “Bagaimanakah hendaknya seorang pemimpin memerintah pembantunya dan seorang pembantu mengabdikan pemimpinya?”

kǒng zǐ duì      yuē      jūn shǐ chén yǐ lǐ      chén shì jūn yǐ zhōng  
 孔子對(对)曰：君使臣以禮(礼)，臣事君以忠。

*Zhisheng Kongzi* menjawab, “Seorang pemimpin hendaknya memerintah pembantunya sesuai dengan kesusilaan dan seorang pembantu mengabdikan pemimpinya dengan kesetiaan.”

## 2. Berlandaskan Cintakasih dan Kebenaran

Percakapan *Mengzi* dengan beberapa raja muda menjadi ilustrasi tentang bagaimana menjalankan pemerintahan mengatur negara. *Mengzi* sangat konsen terhadap hal ini. Berikut ini adalah percakapan *Mengzi* dengan Raja *Hui* dari Negeri *Liang* yang membahas tentang cintakasih dan kebenaran dengan keuntungan. Dalam kitab *Mengzi* jilid IA:1.1 – 1.4, tersurat;

mèng zǐ jiàn      liáng huì wáng  
 孟子見(见)梁惠王。

*Mengzi* menemui Raja *Hui* dari Negeri *Liang*.

wáng yuē sǒu bú yuǎn qiān lǐ ér lái yì jiāng yǒu yǐ lì wú  
王曰：叟，不遠(远)千里而來(来)，亦將(将)有以利吾  
guó hū  
國(国)乎？

Raja bertanya, "Bapak tidak menghiraukan jarak yang beribu-ribu Li (1 Li - Li = ½ Km) datang kemari; adakah ajaran Bapak yang boleh membawa keuntungan bagi negeriku?"

mèng zǐ duì yuē wáng hé bì yuē lì yì yǒu rén yì ér yǐ yǐ  
孟子對(对)曰：王何必曰利？亦有仁義(义)而已矣。

Mengzi menjawab, "Mengapakah baginda menanyakan keuntungan? Yang kubawakan hanyalah cintakasih dan Kebenaran.

wáng yuē hé yǐ lì wú guó dà fu yuē hé yǐ lì wú jiā shì shù rén  
王曰：何以利吾國(国)？大夫曰：何以利吾家？士庶人  
yuē hé yǐ lì wú shēn shàng xià jiāo zhēng lì ér guó wēi yǐ wàn  
曰：何以利吾身？上下交征利，而國(国)危矣！萬(万)  
chéng zhī guó shì qí jūn zhě bì qiān chéng zhī jiā qiān chéng zhī guó  
乘之國(国)弑其君者，必千乘之家；千乘之國(国)，  
shì qí jūn zhě bì bǎi chéng zhī jiā wàn qǔ qiān yān qiān qǔ bǎi yān  
弑其君者，必百乘之家。萬(万)取千焉，千取百焉，  
bú wéi bú duō yǐ gǒu wéi hòu yì ér xiān lì bú duó  
不為(为)不多矣。苟為(为)後(后)義(义)而先利，不奪(夺)  
bú yàn  
不饜(饜)。

Bila baginda bertanya, 'Apakah yang dapat menguntungkan negeriku?'; para pembesar akan bertanya, 'Apakah yang dapat menguntungkan keluargaku?'; dan, rakyat jelatapun akan bertanya, 'Apakah yang dapat menguntungkan diriku?' Bila yang berkedudukan tinggi maupun rendah hanya berebut keuntungan, niscaya negara akan di dalam bahaya. Maka, raja yang memiliki berlaksa kereta perang, kalau sampai terbunuh; tentulah karena perbuatan pangeran yang hanya punya seribu kereta perang; dan pangeran yang hanya mempunyai seribu kereta perang kalau sampai terbunuh, tentulah karena perbuatan keluarga yang hanya punya seratus kereta perang. Bila yang

*berkuasa atas selaksa kereta mengambil seribu, maka yang berkuasa atas seribu kereta berhak mengambil seratus. Jumlah ini kiranya tidak dapat dikatakan tidak banyak; tetapi, bila membelakangkan Kebenaran dan mendahulukan keuntungan, niscaya tidak puas kalau tidak merampas seluruhnya.*

# BAB 04

---

***“ ... DIEMPAT PENJURU LAUTAN,  
SEMUANYA BERSAUDARA. ... ”***



# MENOLAK POLITISASI SARA SEBAGAI KOMODITAS POLITIK

## A. HIDUP HARMONIS DALAM KEBERAGAMAN

Perbedaan yang ada di Indonesia bisa dikatakan dengan keberagaman, dalam hal ini tak ada yang mempertanyakan lagi keberagaman atau pluralitas yang ada di Indonesia, mulai dari suku, agama, ras, bahasa, budaya, hingga adat istiadat. Setiap daerah yang ada di Indonesia mempunyai perbedaan yang menjadi ciri khasnya. Dalam mempersiapkan pembangunan negara yang besar ini, para *founding fathers & mothers* kita telah menyadari bahwa perbedaan yang ada, jika tidak dikelola dan dijaga dengan baik, akan menjadi duri dalam daging yang perlahan dapat menyobek-nyobek kesatuan Indonesia. Sadar akan hal tersebut maka dirumuskanlah sebuah konsep ideologi yang berasal dari sari pati bangsa Indonesia itu sendiri. Sebuah konsep ideologi yang tidak mengikuti arus Liberalisme ala Barat, dan tidak juga mengikuti arus Komunisme ala Timur, konsep tersebut merupakan warisan terbesar dan paling berharga dari para *founding fathers & mothers* yang kini kita kenal dengan Pancasila.

Tidak berlebihan rasanya jika dikatakan bahwa berkat nilai-nilai dasar Pancasila, Indonesia bisa menjadi layaknya taman sari yang penuh dengan bunga-bunga. Dimana setiap bunga yang berwarna-warni tersebut justru memperelok pemandangan kita, mengharumkan indra penciuman kita, dan mempercantik lingkungan kita. Perbedaan dalam kebersamaan yang menjadi tradisi bangsa Indonesia tercinta ini, justru menghadirkan persaudaraan dan keharmonisan dalam berbangsa. Eratnya persaudaraan dan kerukunan kita saat ini harus ditumbuh kembangkan, dan ini adalah tugas kita semua, seluruh elemen masyarakat.

Kesadaran untuk terus merawat keberagaman Indonesia haruslah kita jaga dan tanamkan pada generasi muda bangsa. Karena sesungguhnya, menjaga kerukunan berarti menjaga ekistensi dan identitas bangsa Indonesia.

Sangat disayangkan, jika keberagaman yang telah menjadi identitas bangsa kita harus tergadaikan demi kepentingan segelintir golongan atau kepentingan politik yang bertujuan untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan. Merugilah kita jika kearifan bangsa harus tergadaikan oleh kepentingan dan ego politik semata, sebab luka yang diakibatkan akan menjadi cacat yang sulit untuk diobati dan amat panjang proses untuk merajutnya kembali.

Agama Khonghucu sendiri memandang perbedaan adalah suatu keniscayaan. Hal ini dapat kita lihat dalam filosofi *Yinyang*, yang merupakan sifat *Tian*, Tuhan Yang Maha Esa, dimana ada dua hal yang berbeda, misalnya: positif dan negatif, siang dan malam, langit dan bumi, laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya. *Yinyang* digambarkan dengan sesuatu yang berbeda, akan tetapi perbedaan tersebut bukanlah untuk saling bertentangan dan saling menghancurkan, melainkan dapat saling melengkapi, mengisi, serta mendukung antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, kehidupan kita akan lebih harmonis. Seperti yang tertulis dalam *Lunyu* jilid XIII:23, tersurat:

jūn zǐ hé ér bù tóng xiǎo rén tóng ér bù hé  
君子和而不同，小人同而不和。

“Seorang Junzi dapat rukun meski tidak dapat sama; seorang Xiaoren dapat sama meski tidak dapat rukun.”

Berbicara mengenai kehidupan yang harmonis otomatis berbicara masalah perbedaan, karena kehidupan yang harmonis dihasilkan ketika hal-hal yang berbeda dibawa bersama untuk membentuk suatu kesatuan. Kehidupan yang harmonis dapat diilustrasikan dengan alat musik yang ditabuh/dimainkan secara bersamaan akan terdengar lebih indah bila dibandingkan dengan alunan yang dimainkan satu buah alat musik saja.

Dari sedikit uraian di atas setidaknya dapat kita pahami bahwa kehidupan yang harmonis dapat merupakan hasil dari adanya perbedaan. Akan tetapi, agar keindahan dari keharmonisan tersebut dapat muncul secara maksimal dan dapat terus terjaga, maka masing-masing hal yang berbeda itu harus hadir persis dalam proporsinya (proporsional).

## **B. ISU YANG MERESAHKAN UNTUK BANGSA INDONESIA**

Menghembuskan isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang berisi fitnah sangat berbahaya dan pastinya dapat merusak keharmonisan bangsa kita. Bukan hanya sebagian orang yang dirugikan, tetapi kita semua, sebagai bangsa, akan terluka akibat embusan isu dan fitnahan yang berbau suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Maka, mari kita bersikap dewasa dalam menyikapi persoalan perpolitikan bangsa ini dan isu-isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang mengganggu ketentraman masyarakat. Marilah kita menyikapi politik secara rasional dengan pemikiran yang jernih demi kebaikan bersama dan bangsa kita tercinta.

Betapa pentingnya dalam berpolitik kita menjaga dan menahan diri agar isu-isu berbau suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dapat dihindari. Sebab menggunakan isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) demi kepentingan dan ego politik yang bersifat sementara, sama dengan melukai falsafah dan semboyan bangsa

kita yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Potensi kerusakan bangsa Indonesia begitu besar jika isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) terus dijadikan “komoditas” dalam kancah perpolitikan. Apakah kita tidak malu bangsa yang telah dibangun dengan susah payah oleh para pejuang kita malah dirusak oleh anak bangsa sendiri? Dan apakah kita tidak takut jika dari dalam telah rusak, tentunya Indonesia makin rentan mendapat ancaman dari luar? Hal ini senada dengan apa yang tertulis dalam kitab *Mengzi* IVA:8.4:

fū rén bì zì wǔ rán hòu rén wǔ zhī jiā bì zì huǐ ér hòu rén  
夫 人 必 自 侮 ， 然 后 (后) 人 侮 之 ； 家 必 自 毁 ， 而 后 (后) 人  
huǐ zhī guó bì zì fá ér hòu rén fá zhī  
毁 之 ； 國 (国) 必 自 伐 ， 而 后 (后) 人 伐 之 。

*“Maka orang tentu sudah menistakan diri sendiri, barulah orang lain menghinakannya. Suatu keluarga niscaya telah dirusak sendiri, barulah kemudian orang lain merusakkannya. Suatu negara niscaya telah diserang sendiri, barulah kemudian orang lain menyeranginya.”*

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan kehidupan ini selalu dengan unsur yang berbeda dan perbedaan itu adalah rahmat dari Tuhan Yang Esa, yang harus kita syukuri, dan kita kelola agar bersinergi positif bagi pembangunan bangsa. Suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) seharusnya bukan lagi menjadi sesuatu yang asing bagi bangsa kita. Suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) bukan menjadi sesuatu yang aneh untuk bangsa kita. Suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) bukan menjadi sekat penghalang bagi bangsa kita untuk saling menghormati dan menyayangi sesama. Seperti yang telah sedikit disinggung di atas, suku, ras, agama, antar golongan, dan berbagai keragaman yang ada justru telah menjadi identitas kita. Dari Sabang sampai Marauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita semua berbeda-beda, baik warna kulit, suku, agama, ras, bahasa, budaya, dan adat istiadat, tetapi segala perbedaan itu disatukan oleh

suatu negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Pancasila sebagai perekat utamanya.

Sekali lagi, persoalan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) bukanlah sesuatu yang harus diadu dan diperselisihkan, tetapi harus kita sinergikan agar bermanfaat bagi pembangunan bangsa kita. Persoalan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) tidak selayaknya dijadikan isu atau dagangan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), hingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditahun mendatang. Keragaman SARA harus dikelola untuk mendukung menuju cita-cita Indonesia yang telah termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

Pada beberapa tahun terakhir sudah bukan menjadi tabu lagi bahwa suku, agama, ras, dan antar golongan atau yang disingkat dengan SARA sering menjadi barang “dagangan” demi memuluskan misi politik individu maupun kelompok yang tidak bertanggung jawab. Demi kuasa dan jabatan, para politisi menjadikan identitas-identitas keragaman tersebut saling berbenturan hingga memanas dan menjadi sebuah konflik. Walaupun memang kita harus pahami juga bahwa tak semua politisi itu buruk.

Politik dapat diibaratkan dengan pisau bermata dua, yang artinya kegunaannya tergantung siapa yang menggunakan. Politik akan menjadi baik bahkan mulia jika diisi oleh orang-orang yang baik, dan politik akan menjadi buruk bahkan busuk jika diisi oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab dan sekadar haus jabatan.

Menjelang tahun politik ini, memang kita rasakan bahwa masyarakat kita seolah terbelah dan saling mencemooh satu sama lain. Berbagai media pun dijadikan etalase untuk menjalankan misi-misi yang tidak baik dari mereka yang tidak bertanggung jawab.

## C. MEDIA SEBAGAI ALAT MENYEBARKAN INFORMASI

Media sosial merupakan alat yang tidak memerlukan biaya dalam penggunaannya (gratis), sehingga media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Whatsapp, dan lain-lain) kerap kali dijadikan alat untuk menyebarkan informasi yang tidak benar/hoaks (*hoax*) dan menyebarkan ujaran kebencian (*hate speech*) kepada pihak yang berseberangan. Bahkan saling serang itu menyeret isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Dalam hal ini, kita sebagai masyarakat Indonesia khususnya umat Khonghucu selayaknya bisa lebih cerdas dan bijak dalam menggunakan media sosial. Dalam kitab *Shujing bab IV : VII.C.1.3*, tersurat:

*"... Janganlah kamu saling menghasut yang menimbulkan kemarahan dan membentuk kelompok untuk mencemarkan nama baikku, yang seorang diri ini."*

Hal kecil yang dapat kita lakukan ketika menerima informasi yang kiranya mencurigakan atau berisi ujaran-ujaran kebencian yang dapat mengadu domba yaitu mencari sumber informasi dan mengkonfirmasi kebenarannya, atau yang paling mudah adalah kita tidak perlu membagikan (*share*) informasi tersebut. Dalam kitab *Daxue bab X:2* tertulis:

suǒ wu yū shàng wú yǐ shǐ xià suǒ wu wu yū xià wú yǐ  
所 惡 ( 惡 ) 於 ( 于 ) 上 ， 毋 以 使 下 ； 所 惡 ( 惡 ) 於 ( 于 ) 下 ， 毋 以  
shì shàng suǒ wu yū qián wú yǐ xiān hòu suǒ wu yū  
事 上 ； 所 惡 ( 惡 ) 於 ( 于 ) 前 ， 毋 以 先 後 ( 后 ) ； 所 惡 ( 惡 ) 於  
hòu wú yǐ cóng qián suǒ wu yū yòu wú yǐ jiāo  
( 于 ) 後 ( 后 ) ， 毋 以 從 ( 从 ) 前 ； 所 惡 ( 惡 ) 於 ( 于 ) 右 ， 毋 以 交  
yū zuǒ suǒ wu yū zuǒ wú yǐ jiāo yū yòu cǐ zhī wèi  
於 ( 于 ) 左 ； 所 惡 ( 惡 ) 於 ( 于 ) 左 ， 毋 以 交 於 ( 于 ) 右 ； 此 之 謂  
xié jǔ zhī dào  
( 谓 ) 絜 矩 之 道 。

*Apa yang tidak baik dari atas tidak dilanjutkan kebawah; apa yang tidak baik dari bawah tidak dilanjutkan keatas; apa yang tidak baik dari muka tidak dilanjutkan kebelakang; apa yang tidak baik dari belakang tidak dilanjutkan ke muka; apa yang tidak baik dari kanan tidak dilanjutkan ke kiri; apa yang tidak baik dari kiri tidak dilanjutkan ke kanan. Inilah yang dinamai dao yang bersifat siku.”*

## **D. TOLERANSI DIDALAM MASYARAKAT**

Salah satu sikap yang harus kita jaga dan kembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar konflik berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dapat dihindari adalah sikap toleransi. **Michael Walzer (1997)**, memandang toleransi sebagai keniscayaan dalam ruang individu dan ruang publik karena salah satu tujuan toleransi adalah membangun hidup damai (*peaceful coexistence*) diantara berbagai kelompok masyarakat dari berbagai perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan dan identitas. Sebagai masyarakat Indonesia kita harus bertoleransi dengan segala sesuatu hal yang berbeda dengan kita, termasuk di dalamnya toleransi antar umat beragama.

Toleransi antar umat beragama berarti sikap sabar yang dimiliki oleh seseorang untuk membiarkan orang lain memiliki keyakinan lain dan melakukan hal yang lain sehubungan dengan agama/kepercayaan yang diyakininya. Dalam *Lunyu* jilid XII:5, tersurat: *Zixia* berkata:

sì hǎi zhī nèi      jiē xiōng dì yě  
 四海之内，皆兄弟也。

*“ ... Diempat penjuru lautan, semuanya bersaudara. ...”*

Dalam hal ini, sikap toleransi, tenggang rasa, dan saling menghormati antarumat beragama, harus ditanamkan kepada generasi Indonesia mendatang. Mereka adalah pemegang tongkat estafet pembangunan negeri ini. Peran pemerintah dan lingkungan sangat penting untuk menanamkan sikap ini kepada generasi muda.

Lingkungan keluarga amat penting dalam mensosialisasikan budaya rukun dan toleran, sebab dari sikap dan ajaran yang ditanamkan oleh orangtua mereka akan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan kepribadian generasi muda tersebut. Peran pemerintah juga amat penting dalam mensosialisasikan ide-ide kerukunan, toleransi, dan kemanusiaan. Sebab negara juga bertanggung jawab dalam mendidik dan membentuk karakter mental masyarakatnya, yaitu karakter yang sadar akan perbedaan, mampu menerimanya dan mampu mengelolanya.

## **E. ANCAMAN PIDANA DALAM KUHP TERKAIT SARA, LARANGAN KAMPANYE DAN SANKSI ATAS PELANGGARAN LARANGAN KAMPANYE DALAM PEMILU TERKAIT SARA**

Salah satu upaya negara dalam menjaga keragaman yang ada di Indonesia ialah melalui regulasi-regulasi hukum yang ada. Beberapa pasal dalam perundang-undangan kita dengan jelas melarang penggunaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagai bahan untuk mengungkapkan dan menyebarkan kebencian baik secara verbal maupun melalui media. Setidaknya ada beberapa regulasi yang mengatur hal tersebut pertama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 156, 156a, dan 157 ayat 1 yang berbunyi:

### **Pasal 156**

*“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata Negara.”*

### **Pasal 156a**

*“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

### **Pasal 157 ayat 1**

*“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.*

Selain dalam KUHP regulasi terdapat juga aturan dalam UU Nomor

40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis pasal 4 dan 16 yang berbunyi:

#### **Pasal 4**

*Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa:*

- a. *Memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau*
- b. *Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:*
  1. *Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;*
  2. *Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;*
  3. *Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau*
  4. *Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.*

#### **Pasal 16**

*Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau*

*rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

Selanjutnya ada juga dalam UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2) dan juncto pasal 45A yang berbunyi:

*Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Selain pasal-pasal yang telah dipaparkan di atas, terdapat pula regulasi hukum yang telah secara khusus mengatur tentang larangan menggunakan SARA sebagai pemulus jalan untuk mendapatkan jabatan. Hal tersebut terdapat dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tepatnya pada pasal 280 ayat 1 poin a sampai j tentang Larangan dalam Kampanye dan pasal 285 tentang Sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye yang berbunyi:

### **Pasal 280**

- (1) *Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:*
  - a. *Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;*

- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/ atau Peserta Pemilu yang lain;*
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;*
- e. Mengganggu ketertiban umum;*
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;*
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;*
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;*
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan;*
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.*

## **Pasal 285**

*Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DRR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:*

- a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi; dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau*
- b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.*

# BAB 05

---

**ZHISHENG BERSABDA, "KAYA DAN BERKEDUDUKAN MULIA IALAH KEINGINAN TIAP ORANG, TETAPI BILA TIDAK DAPAT DICAPAI DENGAN JALAN SUCI, JANGANLAH DITEPATI. MISKIN DAN BERKEDUDUKAN RENDAH IALAH KEBENCIAN TIAP ORANG, TETAPI BILA TIDAK DAPAT DISINGKIRI DENGAN JALAN SUCI, JANGAN DITINGGALKAN."**

# MENOLAK POLITIK UANG

## A. PANDANGAN HUKUM PADA POLITIK UANG

Pada saat memasuki masa-masa Pemilu, para elite politik berlomba untuk mendapatkan simpati masyarakat dengan cara apapun, salah satunya dengan politik uang. Dalam peraturan pemerintah bagi siapapun yang melakukan politik uang maka bisa dipidanakan. Lalu apa yang dimaksud dengan politik uang?

*Money politic* berarti menggunakan uang sebagai alat untuk mencapai tujuan politik, salah satu bentuknya yang paling sering ditemukan adalah 'Suap'. Arti 'Suap' menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* adalah uang sogok. Secara umum, *money politic* biasa diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. (Indra Ismawan, *Dewan Perwakilan Daerah: bikameral setengah hati*. 1999. h.65) Bentuk dari politik uang bisa berupa uang ataupun barang. Tujuan dari politik uang adalah memengaruhi orang agar memberi dukungan pada individu tertentu yang menginginkan jabatan tertentu. Maka, politik uang termasuk bentuk pelanggaran dalam suasana kampanye.

Politik uang memiliki potensi yang bisa merugikan negara, karena ada kecenderungan jika sudah berhasil memenangkan suara ada upaya untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan sebelumnya. Hal ini dapat menjurus pada tindakan korupsi. Politik uang sangat merugikan bagi kemajuan bangsa dalam sistem demokrasi di Indonesia, karena akan mengakibatkan hal-hal berikut:

## **1. Merusak Moral Bangsa**

Dampak dari politik uang bisa mengakibatkan kerusakan moral. Hati nurani hilang karena dibeli dengan uang ataupun barang. Tanggung jawab sebagai warga negara dikesampingkan demi keuntungan sesaat.

## **2. Menjauh dari terciptanya masyarakat yang Adil dan Beradab**

Dampak dari politik uang juga mengganggu suasana demokrasi. Rakyat memilih calon pemimpin hanya karena ingin mendapatkan imbalan. Keadilan tidak akan dilihat sebagai keutamaan dalam memilih. Etika tertutup oleh silaunya materi, menyebabkan timbulnya masyarakat yang tidak beradab.

## **3. Hilang kesempatan memperoleh Pemimpin Berintegritas dan Kredibel**

Pengguna Politik uang tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Karena pelanggaran yang dilakukannya ini tidak mencerminkan kejujuran terhadap hati nuraninya. Kepercayaan diri yang rendah sudah tentu tidak akan mampu memikul tanggung jawab besar sebagai seorang pemimpin.

## **4. Timbulnya Potensi Korupsi**

Politik uang melahirkan korupsi, dana yang telah dikeluarkan untuk melakukan upaya mencari dukungan politik akan menjadi beban untuk dikembalikan. Jika sudah mendapatkan posisi yang diinginkan, celah akan dicari untuk menimbun materi guna membalikan modal. Kewenangan yang dimiliki akan dimanfaatkan untuk mencari keuntungan.

## **5. Kekuasaan adalah segalanya**

Kaderisasi berawal dari kata "kader" yang memiliki makna yaitu, orang yang diharapkan akan memegang peran yang penting

dalam sebuah organisasi. Dengan demikian, kaderisasi adalah suatu proses dalam membentuk kader-kader baru dalam sebuah organisasi tersebut. Kaderisasi itu harus memiliki konsep, tujuan, proses, dan hasil yang mampu membuat kemajuan organisasi tersebut. Pemimpin yang memperoleh kemenangan akibat politik uang akan melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang yang dipercaya. Ia akan menjadikan kepentingan pribadi dan kelompoknya hanya untuk mempertahankan kekuasaan, bukan untuk melayani masyarakat. Sehingga akan ada upaya untuk memunculkan kader-kader binaannya dalam pemilihan-pemilihan berikutnya. Hal ini membuat kaderisasi menjadi salah arah.

Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan jelas melarang untuk melakukan politik uang. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjelaskan peraturan mengenai mahar politik secara implisit sebetulnya masuk dalam kategori politik uang yang dilarang dan diancam dengan sanksi denda, pidana bahkan pembatalan pencalonan. Pada undang-undang nomor 8 Tahun 2015 Pasal 47, menjelaskan sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 47**

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
- (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Setiap orang atau Lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- (5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan.

- (6) Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.

Pada undang-undang nomor 10 tahun 2016, terdapat pasal 73 yang berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 73**

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilihan.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
  - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
  - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Pada undang-undang nomor 10 tahun 2016. Di antara Pasal 187 dan Pasal 188 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 187A sampai dengan Pasal 187D, tertulis sebagai berikut:

### **Pasal 187A**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 187B**

Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

### **Pasal 187C**

Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

## **Pasal 187D**

Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Jadi dalam tata hukum yang berlaku di Indonesia sudah sangat jelas bahwa politik uang melanggar undang-undang dan memiliki konsekuensi hukum. Hukum yang berlaku bisa dikenakan oleh penerima, pemberi maupun lembaga terkait. Sanksi dalam politik uang yaitu pidana dan denda.

## B. POLITIK UANG DALAM SUDUT PANDANG KHONGHUCU

Sesuai dengan ajaran Khonghucu mengenai politik uang. Terdapat ayat pada *Sishu*, Kitab *Daxue* bab VI:4, tersurat:

fù rùn wū dé rùn shēn xīn guǎng tǐ pàng gù jūn zǐ  
 富潤(潤)屋，德潤(潤)身，心廣(廣)體(體)胖。故君子  
 bì chéng qí yì  
 必誠(誠)其意。

*“Harta benda dapat menghias rumah, laku bajik menghias diri; hati yang lapang itu akan membawa tubuh kita sehat. Maka seorang Junzi senantiasa mengimankan tekadnya.”*

*Junzi* adalah manusia budiman, susilawan, seorang manusia dengan seluruh kebijakan dan keagungannya. Menjadi *Junzi* adalah idealisme moral manusia tertinggi yang harus dicapai dalam Konfusianisme. Rakyat harus mengingat, bahwa uang yang diberikan oleh pelaku politik uang tidak berlandaskan kebenaran. Uang itu jangan diterima karena hanya untuk kepentingan pribadi. Rakyat harus bertekad untuk menolak politik uang demi terciptanya Pemilu yang bersih.

Elite politik hendaknya mengimankan tekadnya didalam melaksanakan tujuan mulianya demi kemajuan Indonesia, bukan mencari keuntungan demi kepentingan pribadi melalui politik uang. Pejabat harus memiliki sikap sebagai pelayan negara. Melayani setiap masalah yang dialami warganya dengan rasa cintakasih, sehingga bisa dipercaya oleh setiap rakyat. Setiap laku bajik yang dilakukan oleh elite politik akan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat, tetapi sebaliknya jika hanya mencari keuntungan, maka yang akan terjadi hanyalah kesengsaraan bagi rakyat saja.

Menjadi kaya dan berkedudukan itu merupakan keinginan setiap orang, tetapi ajaran Khonghucu menegaskan kalau untuk

mendapatkan kedudukan dan kekayaan yang tidak sesuai kebenaran seperti dengan cara menggunakan politik uang, jangan dilakukan. Dalam *Lunyu* jilid IV:5 :

zǐ yuē fù yǔ guì shì rén zhī suǒ yù  
子曰：富與(与)貴(贵)，是人之所欲  
bú chù yě pín yǔ jiàn shì  
不處(处)也。貧(贫)與(与)賤(贱)，是  
yǐ qí dào dé zhī bú qù yě  
以其道得之，不去也。

*Zhisheng* bersabda, “Kaya dan berkedudukan mulia ialah keinginan tiap orang, tetapi bila tidak dapat dicapai dengan Jalan Suci, janganlah ditepati. Miskin dan berkedudukan rendah ialah kebencian tiap orang, tetapi bila tidak dapat disingkiri dengan Jalan Suci, jangan ditinggalkan.”

Setiap orang tidak ada yang mau berada didalam keadaan miskin dan tidak memiliki kedudukan. Setiap orang ingin memiliki kedudukan yang terhormat dan kaya, meskipun susah dan tidak memiliki kedudukan, bila memang semua berdasarkan kebenaran, maka lakukanlah. Terkait politik uang, setiap parpol dan calon pemimpin yang ingin terpilih dalam Pemilu, tetapi jika menggunakan politik uang untuk memenangkannya, dalam ajaran Khonghucu itu sangat dilarang. Bagaimanapun keadaan dan keinginan setiap orang haruslah berlandaskan kebenaran, jangan menyeleweng.

Tujuan dari politik uang salah satunya adalah untuk mendapatkan kedudukan yang diinginkan. Ketika sudah mendapatkan kedudukan, maka kekuasaan yang dimiliki menjadi peluang bagi elite politik mewujudkan kepentingannya. Didalam ajaran Khonghucu, persoalan

tentang politik uang juga berkaitan dengan berpericintakasih, bukan hanya berhati cintakasih. Di dalam Pemilu, kader yang diusung jangan hanya berhati baik tetapi harus mempunyai sikap sebagai seorang negarawan.

Seorang negarawan yang berperici cintakasih akan mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi. Maka hanya seorang negarawan yang berpericintakasih yang patut dipilih untuk mendapatkan kedudukan, sesuai dengan kemampuannya. Tetapi jika memilih orang yang tidak berpericintakasih, seperti melakukan suap untuk mendapatkan berkedudukan tinggi, niscaya akan menyengsarakan rakyat. Ada satu kutipan dalam ajaran Khonghucu yang tersurat dalam Kitab *Mengzi* jilid IVA:1.9:

上無(无)禮(礼), 下無學(学), 賊(賊)民興(兴), 喪(丧)無(无)日矣。

*"...Bila yang di atas tidak susila, yang di bawah tidak belajar, sehingga perampok-perampok bangkit; maka kemusnaannya sudah tidak menunggu hari lagi."*

Betapa berbahayanya jika politik uang dilakukan, akan banyak kasus korupsi yang terjadi. Bila rakyat sangat mudah untuk disuap dan partai atau organisasi politik tidak mencegah terjadinya politik uang bahkan sampai melakukan politik uang, maka akan banyak perampok. Perampok yang dimaksud dalam hal ini adalah orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi dengan cara melakukan politik uang atau kejahatan lainnya. Banyak kasus politik uang dampaknya menjadi korupsi. Jika rakyat mudah tergiur dan calon pemimpin melakukan politik uang, maka bangsa akan berada dalam

kesulitan. Dalam kitab *Mengzi* jilid VIIA: 27 tersurat :

mèng zǐ yuē jī zhě gān shí kě zhě gān yǐn shì wèi dé yǐn  
孟子曰：飢(饥)者甘食，渴者甘飲(饮)，是未得飲(饮)  
shí zhī zhèng yě jī kě hài zhī yě  
食之正也，飢(饥)渴害之也。

*Mengzi* berkata, "Orang yang lapar puas dengan segala makanan, yang haus puas dengan segala minuman. Hal itu bukan karena ia dapat merasakan makanan atau minuman itu benar-benar, melainkan ia sudah dirusak oleh lapar dan hausnya.

qǐ wéi kǒu fù yǒu jī kě zhī hài rén xīn yì jiē yǒu hài  
豈(岂)惟口腹有飢(饥)渴之害?人心亦皆有害。

"Hanya mulut dan perut orang sajakah dapat dirusak lapar dan haus? Hati orang pun dapat dirusak secara itu.

rén néng wú yǐ jī kě zhī hài wéi xīn hài zé bù jí rén bù  
人能無(无)以飢(饥)渴之害為(为)心害，則(则)不及人不  
wéi yǒu yǐ  
為(为)憂(忧)矣。

"Kalau orang dapat membebaskan diri dari pengaruh lapar dan haus, ia tidak akan sedih hanya karena tidak dapat sama dengan orang lain."

Setiap manusia mempunyai nafsu. Tetapi seharusnya nafsu itu dikendalikan, bukan dibiarkan, hingga mengakibatkan hilangnya rasa malu. Politik uang terjadi karena sudah hilangnya rasa malu. Saat rasa malu seseorang itu sudah hilang, maka segala cara akan dilakukan dan mengabaikan kebenaran. Walau mereka berkecukupan, tetapi tidak akan pernah puas dengan apa yang

didapatnya. Apa yang mereka lakukan salah, tetapi tetap dilakukan karena sudah tidak memiliki moralitas lagi. Seharusnya mereka malu jika apa yang dilakukan hanya untuk memenuhi hawa nafsunya.

Dalam agama Khonghucu politik uang itu dilarang, karena melanggar kesusilaan. Ada kutipan dari *Zhisheng Kongzi*, "*Yang tidak susila jangan dilihat, yang tidak susila jangan didengar, yang tidak susila jangan dibicarakan, dan yang tidak susila jangan dilakukan.*" Kutipan itu mengingatkan bahwa yang tidak berlandaskan kesusilaan dalam artian kebenaran, janganlah dilakukan. Ketika melihat terjadi politik uang, sebagai warga negara hendaknya jangan dilihat keuntungannya, jangan didengar manfaat yang akan didapatnya, jangan dibicarakan cara melakukannya dan jangan dilakukan politik uangnya. Pada dasarnya yang tidak benar, dilarang untuk dilakukan.

Seharusnya pemimpin atau elite politik, di dalam memangku jabatan mengetahui tujuan dari tugas dan kedudukan yang dipegangnya. Jika hanya ingin mempunyai kedudukan tapi tidak *ada akuntabilitas, integritas, dan kredibilitas*, maka semua itu hanya perilaku mencuri kedudukan. Jika tidak bisa menjalankan tugas dan melaksanakan jalan suci, harusnya mereka malu dengan tanggung jawab yang telah diberikan oleh rakyat, bukan malah berebut jabatan demi kekayaan dan kekuasaan melalui politik uang.

Berdasarkan Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu tugas Bawaslu adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap politik uang. Dengan demikian dukungan masyarakat sangat diharapkan agar tugas Bawaslu tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Politik uang sudah sangat berbahaya, bukan hanya bisa dilakukan kepada perseorangan tetapi bisa dilakukan kepada lembaga. Untuk menjatuhkan musuhnya segala cara dilakukan. Cara menyogok

atau melakukan politik transaksional terhadap suatu organisasi bisa saja terjadi agar menggerakkan massanya untuk memengaruhi pilihannya. Dana tersebut dimaksudkan untuk menyogok agar setiap anggota atau pengurus organisasi memilih calon pemimpin yang memberikan imbalan tersebut.

Jika memang menemukan pelaku yang melakukan politik uang, biar bagaimanapun caranya segera lawan dan laporkan orang tersebut. Ajaran Khonghucu mengajarkan jangan takut akan kebenaran karena hanya kebajikan Tuhan berkenan. Dengan melaporkan kejahatan politik uang maka sudah bisa dikatakan membantu menjaga Pemilu yang bersih dan beradab.

## **C. PEMILU YANG BERSIH TANPA POLITIK UANG**

Beberapa solusi untuk menciptakan Pemilu yang bersih tanpa menggunakan politik uang dalam agama Khonghucu:

### **1. Calon Pemimpin Harus Mengutamakan Perbuatan.**

Untuk mencegah terjadinya politik uang, maka harus timbul rasa kesadaran dimana perbuatan harus selaras dengan watak sejati untuk menempuh jalan suci. Watak sejati yang dimaksud adalah Firman Tuhan yang diberikan kepada manusia, dengan tujuan untuk berbuat kebajikan. Harta tidak akan menentukan apakah kita akan dikenang didalam hidup, melainkan hanya perbuatan bajik yang telah dilakukan yang akan dikenang. Sebagai elite politik bukan seberapa besarkah partai atau kedudukannya yang dimiliki, tapi seberapa banyaknya perbuatan mereka yang bisa menolong dan membantu rakyat yang membutuhkan. Calon pemimpin yang bijak akan terlihat dari perbuatannya, bukan perkataannya. Jika perbuatannya berdasarkan kebajikan, tanpa harus berbuat curang untuk memenangkan Pemilu, maka rakyat dengan sendirinya akan memilih. Inilah yang dinamakan keadilan. Maka jadikanlah Pemilu sebagai ajang adu program yang berguna bagi masyarakat

tanpa harus melakukan politik uang. Kalau Pemilu hanya dijadikan ajang perebutan kedudukan, niscaya rakyat akan tidak mempedulikannya. Dengan keteladanan setiap calon pemimpin, rakyat akan melihat dan memilih dengan layak.

## **2. Calon Pemimpin Harus Mempunyai Bersikap Sebagai Negarawan**

Calon pemimpin harusnya memiliki rasa sikap kenegarawanan yang mendalam. Merasa khawatir jika tidak ada lagi rasa keadilan, maka mereka tidak menggunakan cara curang untuk memenangkan sebuah Pemilu. Keadilan merupakan cerminan dari perasaan sentosa. Sebagai calon pemimpin bukan harta dan kekuasaan yang menjadi hal utama. Menciptakan keadilan untuk mewujudkan perasaan sentosa itulah yang utama. Dengan sikap kenegarawanan, maka Pemilu yang dilakukan untuk pemilihan pemimpin bukan semata-mata untuk perebutan kedudukan, melainkan terwujudnya perasaan sentosa. Seorang calon pemimpin harus takut jika Pemilu menggunakan cara curang, karena dampaknya akan menimbulkan perpecahan, dan rasa ketidakpercayaan rakyat kepada parpol atau pemimpin. Seorang negarawan tidak akan melakukan politik uang, karena mencintai negaranya dan sadar akan pentingnya kepercayaan rakyat.

## **3. Calon Pemimpin Tidak Tamak Akan Harta Benda dan Kedudukan.**

*Zhisheng Kongzi* pernah berkata, “Bila tidak tamak akan harta benda, sekalipun diberi upah tidak akan ada orang yang mau mencuri.” Jadi kalau calon pemimpin tidak tamak, maka tidak akan ada politik uang. Ketamakan harta mengakibatkan banyak kejahatan terjadi. Dari mulai penipuan, pencurian, bahkan korupsi. Semua itu perwujudan dari ketamakan harta benda. Di Indonesia kasus korupsi sering terjadi dikalangan elite politik. Karena ketamakan akan harta benda, maka kecurangan menjadi jalan untuk mendapatkan kekuasaan. Walau kehidupan mereka sudah

berkecukupan tetapi karena ketamakannya menjadikan mereka buta hati nurani. Merasa selalu kekurangan dan tidak pernah puas, meskipun bukan haknya tetap tidak dipedulikan.

Jika elite politik tamak akan harta, maka segala cara dilakukan, bahkan dengan cara politik uang sekalipun. Politik uang yang digunakan untuk mencari kedudukan sama dengan tamak harta dan kekuasaan. Maka calon pemimpin dan rakyat harus mengutamakan kebajikan didalam Pemilu dengan cara tidak melakukan politik uang.

#### **4. Tidak Melakukan Politik Uang Saat Kampanye**

Pemilu harusnya dilakukan dengan berlandaskan kebenaran. Perbuatan curang yang tidak berlandaskan dengan kebenaran hanyalah perbuatan yang dapat merusak nama baik. *Zhisheng Kongzi* pernah berkata, *"Maka harta dan kemuliaan yang tidak berlandaskan Kebenaran, bagi-Ku laksana awan yang berlalu saja."* Jika elite politik memiliki pemikiran yang bijak, maka tidak akan terjadi politik uang. Ajaran Khonghucu mengajarkan, bahwa harta benda yang didapat tidak berlandaskan kebenaran, maka hanya sia-sia atau tidak ada manfaatnya. Didalamnya tidak memiliki nilai dan kemuliaan. Maka untuk menghindari politik uang, janganlah kampanye dengan maksud tertentu yaitu melakukan politik uang. Untuk mendapatkan suara rakyat dengan cara menyogok, ini sudah melanggar peraturan kampanye.

#### **5. Calon Pemimpin Harus Berlandaskan Kebenaran**

Mengenai calon pemimpin harus berlandaskan kebenaran tersurat dalam *Daxue X:23*, sebagai berikut;

cháng guó jiā ér wù cái yòng zhě bì zì xiǎo rén yī  
長 (长) 國 (国) 家 而 務 (务) 財 (财) 用 者 , 必 自 小 人 矣 ,  
bǐ wéi shàn zhī xiǎo rén zhī shǐ wéi guó jiā zāi hài  
彼 為 (为) 善 之 。 小 人 之 使 為 (为) 國 (国) 家 , 菑 (灾) 害  
bìng zhì suī yǒu shàn zhě yì wú rú zhī hé yī cǐ  
並 (并) 至 , 雖 (虽) 有 善 者 , 亦 無 (无) 如 之 何 矣 。 此  
wèi guó bù yǐ lì wéi lì yǐ yì wéi lì yé  
謂 (谓) 國 (国) 不 以 利 為 (为) 利 , 以 義 (义) 為 (为) 利 也

*Pemimpin negara yang hanya mengutamakan harta saja, menunjukkan dia seorang rendah budi (xiaoren). Jika perbuatan rendah budi dianggap baik, maka akan datanglah malapetaka bagi negara itu. Bila hal ini sudah terjadi meski datang seorang yang Baik, iapun tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Maka dikatakan 'suatu negara janganlah menganggap keuntungan sebagai Keberuntungan, tetapi pandanglah Kebenaran sebagai Keberuntungan.'*

Rendah budi adalah seseorang yang memiliki moralitas yang rendah dan tidak mengutamakan kebajikan sebagai pokok utama. Jika pemimpin menjunjung tinggi kebenaran, maka tidak akan ada politik uang ataupun semua kecurangan yang akan terjadi di Pemilu. Hati nurani rakyat sangat berpengaruh pada negara Indonesia ini. Kalau pemimpin gampang tergiur dengan harta dan kekuasaan, maka segala cara seperti sogok, suap atau apapun yang bertentangan dengan kebenaran akan dilakukan. Dengan begitu negara ini akan dilanda malapetaka. Malapetaka yang terjadi bisa berupa kerusuhan, hingga konflik yang mengakibatkan kehancuran Indoensia. Sejatinya, pemimpin akan menentukan kemana Indonesia ini akan dibawa. Rakyat sangat berperan terhadap pemilihan pemimpin, maka harusnya rakyat memiliki sikap yang bijak dalam memilih pemimpin. Jangan sampai tergiur oleh iming-iming lalu mengikutinya atau menerima ajakan politik uang. Jika sampai rakyat dan calon pemimpin tidak berlandaskan kebenaran, maka Indonesia akan mendapatkan kesulitan.

## 6. Calon Pemimpin Harus Selalu Membina Diri

Calon pemimpin pada Pemilu harus memiliki rasa cintakasih terhadap rakyatnya. Setiap hak rakyat haruslah dipenuhi. Calon pemimpin harus selalu membina diri untuk dapat berguna bagi rakyatnya. Karena pemimpinlah yang akan membuat rasa keadilan dan kesejahteraan, bukan memanfaatkan rakyat demi kepentingan pribadi. Jika calon pemimpin semua memegang teguh cintakasih, maka tidak akan ada kecurangan yang akan terjadi. Semua bertujuan untuk kemajuan negara Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun parpolnya. Tidak akan ada lagi praktik politik uang, sebab sadar bahwa menjadi pemimpin itu bagian dari pengabdian kepada negara dan janji satya kepada Tuhan dengan cara melayani masyarakat.

Politik uang itu digunakan oleh orang mengutamakan kepentingan pribadinya. Dalam hal ini umat Khonghucu menolak tegas politik uang. Segala sesuatu yang tidak berlandaskan kebenaran janganlah dilakukan. Mencari pemimpin yang layak untuk dipilih itu harus dilihat dari *intergritas*, *akuntabilitas*, dan *kredibilitasnya*. Sebab pilihan kita dalam proses Pemilu akan menentukan Indonesia akan mengalami kemajuan atau kemunduran. Jika memang mengetahui pelaku politik uang, maka segera laporkan. Dengan begitu akan menjaga proses demokrasi yang adil dan beradab.

## PENUTUP

Kami umat Khonghucu akan menjaga Pemilu yang bersih dan adil sesuai ajaran *Zhisheng* Kongzi. Kami umat Khonghucu memegang teguh kebenaran didalam proses Pemilu. Politik uang dan politisasi SARA harus ditindak tegas, karena tidak sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Politik yang bersih akan menciptakan demokrasi yang baik dan beradab. Dengan begitu akan memunculkan pemimpin yang sejati dan amanah. Pemimpin yang baik haruslah mempunyai teladan yang baik untuk masyarakat, *berintegritas*, menjunjung *akuntabilitas*, serta memiliki *kredibilitas* yang mumpuni.

Dalam proses Pemilu calon pemimpin harus menjunjung tinggi keadilan dan menunjukkan program terbaiknya, bukan justru melakukan kecurangan. Dengan sikap yang bijak calon pemimpin harus paham bahwa tugasnya adalah untuk mengabdikan pada Indonesia dan melakukan pelayanan pada masyarakat.

Kami umat Khonghucu akan menyebarkan pesan-pesan perdamaian didalam Pemilu dengan rasa satya kepada firman Tian dan dapat dipercaya terhadap sesama. Kami mengajak setiap warga negara dapat memegang teguh kebajikan. Dan selalu siap melakukan pencegahan terhadap segala perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran dan hukum yang berlaku.

# DAFTAR PUSTAKA

- Liji. *Kitab Kesesilaan*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia. 2016.
- Indra, Ismawan. *Dewan perwakilan daerah: bikameral setengah hati*. Yogyakarta: Media Pressindo. 1999.
- Sishu. *Kitab Yang Empat*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia. 2016.
- Shijing. *Kitab Sanjak*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia. 2016.
- Shujing. *Kitab Dokumentasi Sejarah Suci Agama Khonghucu*. Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Agama Republik Indonesia. 2015.
- Walzer, Michael. *On Toleration Castle Lectures in Ethics, Politics, and Economics* (New York: YaleUniversity Press, 1997).
- Xiaojing. *Kitab Bakti*. Solo: MATAKIN. 2008.
- Yijing. *Kitab Perubahan Alam Semesta*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia. 2016.

# GLOSARI

## **C**

**Chengtang** Raja suci

**Chengxin** Ketulusan iman

**Confucian** Kaum khonghucu

## **D**

**Dao** Agama Tao

**Daodejing** Kitab Agama Tao

**Di** Alam/Bumi

## **F**

**Fuzi** Jalan suci antara orangtua dan anak

**Fufu** Jalan suci antar suami dan isteri

## **H**

**He** Harmonis

## **J**

**Jikangzi** Nama orang

**Junchen** Jalan suci antara pemimpin dan pembantunya

**Junzi** Manusia berluhur budi

## **L**

**Laozi** Nabi Agama Tao

**Li** ½ Km

**Liji** Kitab Kesusilaan

## **M**

**Mengzi** Nama tokoh yang meluruskan ajaran Nabi Kongzi. Dikenal sebagai sang penegak.

**Mengzi** Kitab Mengzi

**Minzhi Fumu** Kepemimpinan parental

## **N**

**Neisheng** Kearifan seorang Zhisheng

**Nei** Internal

## **P**

**Pengyou** Jalan suci antara lawan dan sahabat

## **R**

**Ren** Cintakasih

**Ren** Manusia

## **S**

**Sandade** Tripusaka kebajikan

**Sangang** Tiga ikatan

**Sheng** Ketulusan, kemuliaan

**Shijing** Kitab Sanjak

**Shu** Tepasalira

**Shujing** Kitab Dokumen Sejarah Suci

**Sishu** Kitab yang empat

## **T**

**Taishi** Kitab pernyataan besar

**Tian** Tuhan

**Tianzhi Muduo** Genta Rohani

Tuhan

**Tu wei-ming** Nama profesor

## **W**

**Waiwang** Kearifan seorang raja

**Wang** Raja

**Wujing** Lima kitab agama

Khonghucu

## **X**

**Xiaoren** Seorang yang rendah budi

**Xiongdi** Jalan suci antara kakak dan adik

## **Y**

**Yinyang** Konsep dasar filosofis agama Khonghucu

**Yong** Keberanian

**You Zilu**

**Yu Dan** Nama profesor

## **Z**

**Zaiming mingde**

Mengemilangkan kebajikan yang bercahaya

**Zaiqinmin** Mengasihi rakyat

**Zaizhiyu zhishan** Mencapai puncak kebajikan

**Zhi** Kebijaksanaan

**Zhisheng** Nabi

**Zhong** Satya

**Zhong** Tengah / seimbang

**Zhonggong** Pengurus rumah tangga keluarga Ji

**Zhongyong** Kitab Tengah Sempurna

**Zhuangzi** Cendekiawan Dao

**Zigong** Murid ZhishengKongzi

**Zilu** Murid ZhishengKongzi

**Zixia** Murid ZhishengKongzi

**Zizhang** Murid ZhishengKongzi





SERIAL BUKU PENGAWASAN PARTISIPATIF

# PEMILU BERSIH, DAMAI, DAN BERMARTABAT

SUDUT PANDANG KHONGHUCU

“Buku ini adalah referensi bagi para tokoh agama dalam menyampaikan materi pada masyarakat. Bawaslu berharap buku ini menjadi bahan bacaan yang dapat dipakai para tokoh agama untuk menyakinkan masyarakat bahwa semua agama mengajarkan melawan politik uang. Bahwa semua agama mengajarkan untuk tidak saling membenci sebagai bentuk politisasi SARA.

Melalui buku ini, Bawaslu mengajak tokoh agama menjadi agen untuk sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilu. Sebab di dalam buku ini tertuang energi penyelenggaraan Pemilu yang berisikan wawasan pencegahan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap praktik politik uang dan politisasi SARA dalam Pemilu.”

**Abhan**

Ketua Bawaslu



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

**BAGIAN SOSIALISASI BIRO TEKNIS  
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU**